

**MANAJEMEN KONFLIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN
PANCURSARI DENGAN MASYARAKAT DESA TEGALREJO DI
KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan

Oleh:

NURCAHYO DEDI PERMADI

NIM. 135120601111036



INOVASI PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**MANAJEMEN KONFLIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN
PANCURSARI DENGAN MASYARAKAT DESA TEGALREJO DI
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Disusun oleh
Nurchahyo Dedi Permadi
NIM. 135120601111036

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



Andi Setiawan, S.IP., M.Si

NIK.2013048708211001

Tanggal: 27 Desember 2018

Pembimbing Pendamping



Fathur Rahman, S.IP., M.A

NIK. 2011098204291001

Tanggal: 27 Desember 2018

LEMBAR PENGESAHAN

**MANAJEMEN KONFLIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN
PANCURSARI DENGAN MASYARAKAT DESA TEGALREJO DI
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

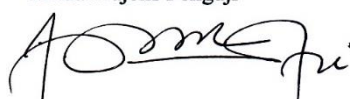
Disusun oleh
Nurchahyo Dedi Permadi
NIM. 135120601111036


Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
pada tanggal 12 Desember 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji


Sekretaris Majelis Penguji


Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si
NIP. 2012 0967 0409 2001


Barqah Prantama, S.AP., MAP
NIK.

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2





Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIK.2013048708211001

Fathur Rahman, S.IP., M.A
NIK. 2011098204291001

Malang, 27 Desember 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Gafar Ludigdo, S.E., M., SI., Ak.
NIP. 196908141994021001

PERNYATAAN

Nama: Nurcahyo Dedi Permadi

Nim. 135120601111036/

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **Manajemen Konflik PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Pancursari dengan Masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 27 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Nurcahyo Dedi Permadi

NIM. 135120601111036

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Manajemen Konflik PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Pancursari Dengan Masyarakat Desa Tegalrejo Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang”***.

Penelitian skripsi ini mendasarkan pada peran pemerintah maupun pihak lainnya dalam proses penyelesaian Konflik Kebun Pancursari. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang turut membantu. Baik berupa saran, bimbingan serta dorongan semangat selama proses penulisan, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan selalu mencurahkan cinta kasih-Nya serta memberikan ridho-Nya sehingga penulis masih dapat merasakan kenikmatan hidup hingga saat ini.
2. Junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada penulis sehingga engkau menjadi panutan hidup untuk mengarungi kehidupan ini.
3. Kedua orang tua yang teramat penulis cintai dan hormati, ibu tercinta Suryani, terimakasih untuk doa yang selalu engkau selipkan dalam setiap sujudmu, terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

4. Mas, Mbak, Adek, Terimakasih atas segala motivasi dan dukungan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Joko Purnomo S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Andi Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing atas segala bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fathur Rahman, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing atas segala bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si selaku dosen penguji atas segala ide, saran dan kritiknya yang membangun membuat penulis belajar untuk memperbaiki tulisan menjadi lebih baik.
9. Barqah Prantama, S.AP., M.AP selaku dosen penguji atas segala ide, saran dan kritiknya yang membangun membuat penulis belajar untuk memperbaiki tulisan menjadi lebih baik.
10. Seluruh dosen serta karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya.
11. Seluruh pihak narasumber yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk penulis dalam mendapatkan informasi data di lapangan untuk kelengkapan data skripsi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ketua Komisi A DPRD Kab. Malang yakni Bapak Drs. Didik Gatot Subroto, Kabag Ops. Polres Malang Bapak Sunardi Riyono, S.H.,

Manajer Kebun Pancursari bapak Hendra dan segenap narasumber lainnya atas ketersediannya untuk wawancara dan bantuannya kepada penulis sehingga dapat mewawancarai beberapa narasumber lainnya.

12. Kepada seluruh teman-teman IPM-C 2013 yang selalu memberikan dukungan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Kawan-kawan penulis. Roy R., Diksa P., Dhafir J., Iwan S, Husnul A., Fairuz A., Deni P., Oky M., A. Rezha, serta seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih selalu memberikan dorongan dan semangat yang besar kepada penulis.
14. Teman-teman terbaik di Ilmu Pemerintahan FISIB UB, terimakasih atas semua dukungan dan pengalaman yang kalian berikan.
15. Terakhir terimakasih kepada Desyana Nila Azizah yang telah selalu mengingatkan dan memberikan motivasi lebih untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semangat setiap saat dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf kepada semua pihak apabila terjadi kesalahan. Harapan penulis semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 27 Desember 2018

Penulis

Nurchahyo Dedi Permadi,

2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang khususnya kepada ibu tercinta yakni ibuSuryani yang selama ini telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan doa terus-menerus tanpa henti, juga kepada Mbah Sulastri, Mas Hadi, Mas Dimas, Mbak Dewi, Adek Budi, Ahmad, Fira, Aliya yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Serta Desayana Nila Azizah yang selalu mendapatkan tempat dihati penulis. Mereka adalah sumber doa-doa saya dan keluarga yang selalu memberi dukungan lahir dan batin. Semoga saya dapat menjadi manusia yang dibanggakan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka dan orang lain.



ABSTRAK

Nurchahyo Dedi Permadi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018. “Manajemen Konflik PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Pancursari dengan Masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang”.

Dosen Pembimbing: Andi Setiawan, S.IP., M.Si dan Fathur Rahman, S.IP., M.A

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan atas tanah selalu meningkat. Baik kebutuhan untuk pembangunan maupun kebutuhan atas dasar ekonomi. Tidak sebandingnya pertumbuhan penduduk dengan luas lahan yang ada membuat nilai tanah maupun lahan semakin tinggi dan mengakibatkan munculnya permasalahan atas tanah. Penelitian ini mengulas konflik serta manajemen konflik kerjasama PT. Perkebunan Nusantara XII kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Konflik penyerobotan lahan perkebunan terjadi karena adanya kepentingan individu maupun kelompok yang didukung oleh kekuasaan sehingga memiliki harapan supaya mendapatkan keuntungan dari adanya pengelolaan lahan perkebunan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana peran pihak ketiga dalam proses penyelesaian permasalahan kebun Pancursari tersebut. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori manajemen konflik Marc Howard Ross dimana ada lima aspek dalam penyelesaiannya. Kelima aspek itu dikenal dengan strategi *joint problem solving* yang berisi tentang identifikasi masalah, penilaian masalah, adanya pihak ketiga, komunikasi efektif dan, kesepakatan bersama. Dari teori tersebut selanjutnya ditinjau sejauh mana proses-proses penyelesaian permasalahan konflik kebun Pancursari tersebut dan siapa saja aktor yang terlibat didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik ini diantaranya DPRD Kabupaten Malang, BPN Kabupaten Malang, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Polres Malang, Muspika Kecamatan Sumbermanjingwetan, Pemerintah Desa Tegalrejo, LBH Surabaya, PTPN XII kebun Pancursari dan Masyarakat Desa Tegalrejo. Selain itu dalam proses penyelesaian permasalahan ini, dalam identifikasi maupun penilaian masalah, terdapat penyimpangan kesepakatan oleh masyarakat penyewa lahan yang sudah tertuang dalam kesepakatan kerjasama sehingga permasalahan ini masuk kedalam jalur hukum.

Kata Kunci: Tanah, Manajemen Konflik, Kerjasama usaha

ABSTRACT

Nurcahyo Dedi Permadi, Governance Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, 2018. "Conflict management PT. Perkebunan Nusantara Pancursari gardens with the people of Tegalrejo village in Sumbermanjingwetan Sub-district, Malang District".

Advisors: Andi Setiawan, S.IP., M.Si and Fathur Rahman, S.IP., M.A

Along with the times, the need for land has always increased. Both the need for development and on an economic basic. Non-comparable population growth with the existing land area makes the value of soil or land increasingly higher and results in the emergence of land problems. This study reviews the conflict and management of conflict of cooperation between PT. Perkebunan Nusantara XII Pancursari garden with the community of Tegalrejo Village in Sumbermanjing Wetan district, Malang Regency. Conflict over land grabbing occur because of the interests of individuals and groups supported by power so that they have hope of benefiting from the management of plantation land. On this basis, this study aims to measure the extent of the role third parties in the process of solving the problems of the Pancursari garden. This research was examined using Marc Howard Ross's conflict management theory where there are five aspects of its resolution. These five aspects are known as joint problem solving strategies which contain identification of problems, assessment of problems, the existence of third parties, effective communication and mutual agreement. From the theory, it is then reviewed the extent to which the processes for solving the problems of the Pancursari garden conflict and who are the actors involved in them. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that there were many actors involved in the conflict resolution process including Malang Regency DPRD, Malang Regency BPN, Malang Regency Land Service, Malang District Police, Sumbermanjingwetan District Muspika, Tegalrejo Village Government, LBH Surabaya, PTPN XII Pancursari and Tegalrejo Village . In addition, in the process of solving this problem, in identifying and evaluating problems, there is a deviation of agreement by the land tenant community that has been contained in the cooperation agreement. so that this problem is included in the legal path.

Keywords: *Land, Conflict Management, Business Cooperation*

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |
| DAFTAR ISTILAH | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR BAGAN..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 12 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| 1.4.1 Manfaat Akademis..... | 13 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 14 |
| 2.2. Kajian Teori..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.1 Konflik | 20 |
| 2.2.2 Teori Manajemen konflik..... | 23 |
| 2.2.3 <i>Joint Problem Solving</i> | 24 |
| 2.3. Alur Penelitian | 27 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 29 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 29 |
| 3.2. Lokasi dan Fokus Penelitian..... | 30 |
| 3.3. Jenis Data..... | 31 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.4.1. Wawancara | 32 |
| 3.4.2. Observasi | 33 |
| 3.4.3. Kajian Dokumentasi | 35 |
| 3.5. Teknik Analisa Data | 36 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN, SERTA SEJARAH KONFLIK PERKEBUNAN PANCURSARI | 40 |
| 4.1. Gambaran umum dan Lokasi Penelitian | 40 |
| 4.2. Sejarah Lahan | 41 |
| 4.2.1. Pada Jaman Kolonial Belanda | 41 |
| 4.2.2. Awal Kemerdekaan | 42 |
| 4.2.3. Terbitya Hak Guna Usaha | 44 |
| 4.2.4. Tahun 90 sampai sekarang | 45 |
| 4.3 Sejarah Konflik Lahan Kebun Pancursari | 46 |
| 4.3.1. Awal Kemerdekaan | 46 |
| 4.3.2. Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Desa Tegalrejo | 46 |
| 4.3.3. Pembatalan Parsial 1996..... | 48 |
| 4.3.4. Kerjasama usaha PTPN XII dengan Masyarakat | 50 |
| 4.3.5. Konflik Kerjasama Usaha..... | 52 |
| BAB V MANAJEMEN KONFLIK PERKEBUNAN PTPN XII KEBUN PANCURSARI. | 55 |

| | |
|---|-----------|
| 5.1. Identifikasi Aktor..... | 55 |
| 5.1.1 PTPN XII Kebun Pancursari. | 58 |
| 5.1.2 Masyarakat Penyewa Lahan. | 59 |
| 5.1.3 Kepolisian Republik Indonesia Polres Malang. | 60 |
| 5.1.4 DPRD Kabupaten Malang. | 61 |
| 5.1.5 Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. | 61 |
| 5.1.6 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. | 62 |
| 5.1.7 Muspika Kecamatan Sumbermanjingwetan. | 62 |
| 5.1.8 Pemerintah Desa Tegalrejo. | 63 |
| 5.1.9 LBH Surabaya. | 63 |
| 5.2 Manajemen Konflik Perkebunan Pancursari dengan Masyarakat Desa Tegalrejo. | 64 |
| 5.2.1 Identifikasi Masalah. | 64 |
| 5.2.2 Penilaian Masalah. | 66 |
| 5.2.3 Masuknya Pihak Ketiga dalam Manajemen Konflik Kebun Pancursari. | 68 |
| 5.2.4 Komunikasi Efektif. | 72 |
| 5.2.4.1 Mediasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Pihak Pemerintah. | 73 |
| 5.2.4.2 <i>heariang</i> , Komunikasi efektif yang dilakukan oleh Pemerintah. | 76 |
| 5.2.5 Kesepakatan Bersama. | 79 |
| BAB VI PENUTUP. | 81 |
| 6.1 Kesimpulan. | 81 |
| 6.2 Rekomendasi. | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| Lampiran | |

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|---------|---|---|
| ATR/BPN | : | Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional |
| BRIMOB | : | Brigade Mobil |
| BUMN | : | Badan Usaha Milik Negara |
| DPR RI | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia |
| DPRD | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Ha | : | Hectare |
| HGU | : | Hak Guna Usaha |
| Km | : | Kilometer |
| KSU | : | Kerjasama Usaha |
| LBH | : | Lembaga Bantuan Hukum |
| PDAM | : | Perusahaan Daerah Air Minum |
| Pemda | : | Pemerintah Daerah |
| Pemprov | : | Pemerintah Provinsi |
| Perda | : | Peraturan Daerah |
| Pergub | : | Peraturan Gubernur |
| PerMen | : | Peraturan Menteri |
| Polres | : | Polisi Resort |
| PPLP | : | Paguyuban Petani Lahan Pantai |
| PTPN | : | Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara |
| TNI | : | Tentara Nasional Indonesia |
| UU | : | Undang-undang |

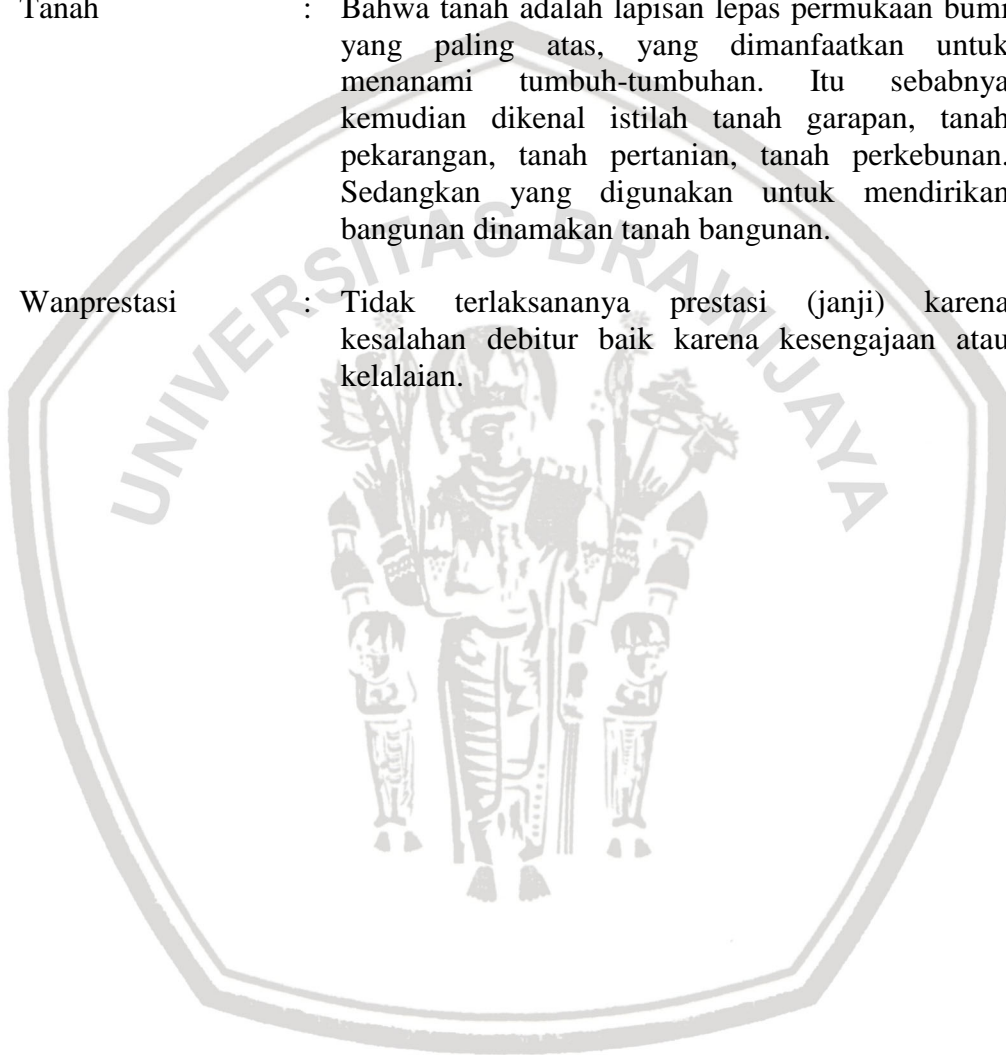
DAFTAR ISTILAH

| | |
|-----------------|--|
| Agraria | : Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian, peruntukan dan kepemilikan lahan. Agraria sering puladisamakan dengan pertanian. |
| Deskriptif | : Jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai seting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena sosial. |
| Dokumentasi | : Cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. |
| Fasilitator | : Seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan. |
| Fenomena | : Sesuatu hal yng bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. |
| Generalisasi | : Penarikan kesimpulan umum dari analisis penelitian yang dibuat dan berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian |
| HGU | : Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan |
| <i>hearing</i> | : Mendengarkan, kegiatan untuk mendengarkan pendapat orang lain mengenai suatu persoalan dimana nantinya hasil dari mendearkan tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih baik. |
| Investasi | : Suatu istilah dengan beberapa penjelasan yang berhubungan dengan keuangan dan ekonom. Istilah ini berkaitan dengan kumulasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. |
| Kerjasama Usaha | : Suatu usaha bersama antara orang perorangan |

ataupun kelompok untuk tujuan bersama

- Konflik : Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
- Kualitatif : Nilai yang dikandung oleh suatu/ sebuah benda, dimana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya.
- Lahan : Semua sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan yang berada dibawah, pada, maupun diatas permukaan suatu bidang geografis.
- Landreform : Perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani dan perombakan ini sifatnya mendasar
- Manajemen : Sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki.
- Mediator : Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
- Multidimensional : Suatu keadaan dimana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dari berbagai aspek kehidupan.
- Narasumber : Seorang informan yang memberi data ataupun informasi yang dibutuhkan dan memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang diteliti dan mempunyai keahlian atau wawasan cukup.
- Observasi : Aktivitas terhadap suatu proses atau obyek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya.

- Sengketa : Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertenggaran, pembantahan yang menjadi perebutan kekuasaan.
- Stakeholder* : Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas suatu organisasi.
- Tanah : Bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan.
- Wanprestasi : Tidak terlaksananya prestasi (janji) karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Daftar peruntukakan lahan Perkebunan Pancursari | 10 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian Ini..... | 15 |
| Tabel 3.1Daftar Informan Penelitian | 33 |
| Tabel 5.1 Pemetaan aktor Manajemen konflik kebun Pancursari. | 56 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian | 28 |
| Bagan 3.1 Alur Analisa Data | 37 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja PTPN XII | 6 |
| Gambar 5.2.4.1 Mediasi di Kecamatan Sumbermanjingwetan. | 75 |
| Gambar 5.2.4.2 <i>hearing</i> pihak kecamatan Sumbermanjingwetan dengan masyarakat pengolah lahan. | 77 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah ataupun lahan merupakan hal terpenting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Di atas tanah manusia mencari nafkah, diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.¹ Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan peningkatan jumlah penduduk, menyebabkan arti dan fungsi tanah bagi kehidupan manusia semakin meningkat. Karena tanah memegang peranan penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional maupun untuk kebutuhan manusia secara pribadi. Bagi masyarakat, kebutuhan akan tanah merupakan fungsi pokok bagi kelangsungan hidup (sebagai tempat tinggal atau sarana investasi). Karena tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan memberikan kemanfaatan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Sehingga dapat dikatakan tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.

¹ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta.Sinar Grafika. 2012 hal. 45.

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa tanah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan produksi pada setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi mempunyai nilai filosofis, politik, social dan kultural.² Dengan berbagai sifat tanah tersebut dapat menjadikan tanah sebagai sebuah harta berharga yang sangat dibutuhkan. Banyak kepentingan yang membutuhkannya, sehingga terusmenerus dan bahkan memicu berbagai masalah sosial yang rumit dikarenakan perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Tidak sebandingnya tanah yang ada membuat adanya ketimpangan dari struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya.

Menurut Bernhard Limbong,³ tanah dan lahan pada ranah akademis berbeda makna dalam penggunaannya bila dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun diskusi sehari-hari. Kaum akademisi lebih cenderung memilih kata lahan apabila membahas permukaan bumi secara keruangan, sedangkan masyarakat awam lebih akrab dengan kata tanah.

Bernhard Limbong membedakan pengertian tanah (*soil*) dengan lahan (*land*), mengutip dari kamus besar Bahasa Indonesia, yaitu tanah meliputi:⁴

- (1) permukaan bumi atau bumi lapisan atas, (2) keadaan bumi di suatu tempat, (3) permukaan bumi yang diberi batas, (4) daratan, (5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah, negara, negeri, (6) bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb), dan (7) dasar (warna cat, dan sebagainya). Sementara lahan diartikan sebagai (1) tanah terbuka,

²Bernhard Limbong. *Politik Pertahanan*. Jakarta, Pustaka Margaretha.2013. Hlm 1

³*Ibid*. hlm 23

⁴*Ibid*.hlm 23

tanah garapan. Dengan demikian, makna tanah berkaitan dengan permukaan bumi, batas persil, wilayah negara, dan material, sedangkan lahan dikaitkan dengan kegiatan bercocok tanam.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan yang selalu meningkat, kebutuhan tanahpun ikut meningkat. Dinamika pembangunan telah menempatkan tanah sebagai hal yang penting dan strategis untuk dikuasai. Ketika kebutuhan tanah semakin meningkat, dan persediaan tanah terbatas atau tidak berubah, munculah benih-benih konflik yang mewarnai pembangunan itu sendiri. Selain itu, masuknya paham ekonomi pasar bebas membuat Negara ini dibanjiri investasi, industrialisasi, yang membutuhkan banyak tanah untuk dieksploitasi. Akibatnya terjadi eksploitasi yang masih terhadap sumber daya alam termasuk tanah yang berdampak negatif terhadap hak-hak rakyat.

Dengan hilangnya hak-hak masyarakat, munculah perselisihan di tengah tengah masyarakat. Sengketa agraria ini semakin marak selama era reformasi terjadi akibat penguasaan tanah yang tidak seimbang. Permasalahan tumpang tindih peraturan, administrasi pertanahan yang kacau dan penegakkan hukum yang lemah adalah persoalan yang kompleks di pertanahan di Indonesia.⁵

Salah satu konflik agraria yang kebanyakan terjadi di Indonesia adalah masalah perkebunan. Pada areal perkebunan, permasalahan terjadi karena masalah HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan maupun program perkebunan inti rakyat. Perkebunan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Namun dalam perkebunan kerap muncul beberapa sengketa yang terjadi antara warga dengan perusahaan perkebunan. Perselisihan ini terjadi karena perusahaan

⁵Bernhard Limbong, *Konflik pertanahan*. Jakarta.Margaretha Pustaka. 2012

perkebunan yang merupakan perusahaan padat karya dan padat modal seringkali diposisikan sebagai pihak dirugikan secara ekonomi bila terjadi suatu sengketa. Hal ini terjadi karena minimnya perangkat hukum yang dapat melindungi kepentingan usahanya, meskipun telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini mengulas konflik serta manajemen konflik kerjasama PT. Perkebunan Nusantara XII kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Konflik penyerobotan lahan perkebunan terjadi karena adanya kepentingan individu maupun kelompok yang didukung oleh kekuasaan sehingga memiliki harapan supaya mendapatkan keuntungan dari adanya pengelolaan lahan perkebunan.

Konflik penyerobotan lahan perkebunan sejatinya disebabkan oleh adanya kerjasama usaha pengelolaan lahan perkebunan PTPN XII kebun Pancursari yang dirasa telah banyak merugikan masyarakat terutama petani. Selain itu, konflik pengelolaan lahan perkebunan Pancursari juga melibatkan banyak aktor yang di antaranya masyarakat Desa Tegalrejo, pemerintah Desa Tegalrejo serta pihak PTPN XII khususnya kebun Pancursari. Dengan adanya permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk membahas manajemen konflik antara PT. Perkebunan Nusantara XII kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang serta upaya yang dilakukan untuk menemukan penyelesaiannya konflik.

Konflik perkebunan di Pancursari ini sudah terjadi cukup lama. Ada tahun 1960, Barisan Tani Indonesia (BTI) mempelopori pembagian tanah perkebunan

untuk digarap oleh warga dalam rangka pelaksanaak *landreform*. Program tersebut terhenti karena adanya gerakan G 30S/PKI dengan luas garapan masyarakat seluas 863,84 ha oleh 1.551 kk.⁶ Pada tahun 1966 tanah tersebut harus dikembalikan ke perkebunan berdasarkan penguasa dwikora daerah Jatim dengan SK No. 24/3/1966 yang berisi tentang menciptakan ketertiban akibat kejadian G 30S/PKI, Menjalin kelancaran produksi, ketahanan pangan dan mempermudah pengawasan Dwikora terhadap perkebunan yang rusak akibat pemberontakan PKI tersebut.

Pada tahun 1980, Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijosudarmo meresmikan peningkatan Desa darurat Tegalrejo menjadi desa Resmi. Pada tahun 1997, Desa Tegalrejo mendapatkan 230 bidang lahan perkebunan melalui keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 207-XXVIII-1997 tanggal 20 Oktober 1997 tentang kelompok kerja penanganan masalah tanah perkebunan Negara, dengan keanggotaan terdiri dari BPN, Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan.⁷ Lahan yang diberikan itu harus ditanami tanaman perkebunan bukan tanaman semusim sehingga terjadinya pola kemitraan antara masyarakat di Desa Tegal rejo dengan PTPN XII.

Pihak PTPN XII selaku pemilik lahan perkebunan memberikan kesempatan kepada warga Desa Tegalrejo untuk ikut dalam pengelolaan perkebunan. Hal ini terjadi karena pihak PTPN XII menganut system kerja sama yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor:13/MBU/09/2014. Dengan

⁶Karnaji. "Konflik tanah perkebunan di Malang selatan". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Th. XVI, No 4, Oktober 2003. Hlm 36

⁷*Ibid*. Hlm 37

adanya peraturan tersebut, pihak perkebunan mempunyai payung hukum untuk melaksanakan kerjasama. Masyarakat Desa Tegalejo melalui Pemerintah Desa Tegalejo dijadikan mitra kerjasama sebagai pelaku penggarap lahan perkebunan. Dengan demikian jelas peran dari ketiga aktor tersebut, PTPN sebagai pemilik lahan, Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai penggarap lahan perkebunan.

Salah satu perusahaan perkebunan di Indonesia adalah PTPN XII. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis dan agri-industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing. PTPN XII mengelola areal perkebunan seluas 80.000an ha dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 34 unit kebun.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kerja PTPN XII



Sumber: www.ptpn12.com.

Didalam gambar diatas dapat dilihat bahwa PTPN XII mempunyai wilayah kerja yang berada di Provinsi Jawa Timur dan membawahi 34 kebun nasional. Perkebunan tersebut tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Provinsi Jawa Timur. PTPN XII sendiri mempunyai 2 kantor perwakilan guna mempermudah pengelolaan wilayah yang berada di Malang dan Jember.

Dari banyaknya perkebunan yang ada di wilayah kerja PTPN XII, terdapat beberapa konflik yang terjadi di wilayah PTPN XII. Mulai dari konflik kebun Sungailembu yang memperlmasalahkan lahan tersebut karena masyarakat beranggapan perkebunan tersebut adalah milik nenek moyang mereka yang berada di Banyuwangi, serta konflik Kebun Pancursari yang ada di Kabupaten Malang. Namun dari beberapa konflik yang terjadi ada salah satu konflik yang menarik dan dikaji yaitu penyerobotan lahan perkebunan Pancursari di Desa Tegalrejo Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.⁸ *Pertama*, konflik ini berawal dari kerjasama usaha yang telah disepakati bersama namun timbul *wanprestasi* dari salah satu pihak yang bekerja sama. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena awal mula kedua aktor yang terlibat memiliki pandangan yang sama dalam mengelola perkebunan menjadi saling membenarkan diri terhadap permasalahan yang dialami. *Kedua*, kebun Pancursari merupakan satu satunya perkebunan yang mengalami konflik lahan di wilayah Kabupaten Malang selain kebun Kalibakar yang sudah habis lahannya untuk dibagikan ke masyarakat.

Perkebunan Pancursari merupakan salah satu dari tiga perkebunan yang berada di kabupaten Malang di bawah PTPN XII. Lokasi kebun tersebut berada di

⁸ <https://kumparan.com/beritajatim/ribuan-pohon-karet-kebun-pancursari-ptpn-xii-dibakar-orang-tak-dikenal>, Di akses hari jum'at, 1 Desember 2017. Pukul 08.21

Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, yang berjarak 62 km arah selatan Kota Malang. Areal konsesi kebun Pancursari se-luas 3.031,0740 hektar terdiri dari dua bagian masing-masing bagian Pancursari se-luas 1.687,6711 ha dan bagian Sumberjeru 1.343,4029 ha.⁹

Perkebunan Pancursari merupakan perkebunan bekas kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, perkebunan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nasionalisasi No. 86 th. 1958/jo/ PP. No 19 tahun 1959.¹⁰ Semua aset dipindahkan ke pemerintah Indonesia dan dijalankan oleh Negara Indonesia. Perkebunan Pancursari ini dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII). PTPN XII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang pelebunan PT Perkebunan Nusantara XXIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XXVI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara XXIX (Persero) yang dituangkan dalam akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 1996.¹¹

Perkebunan Pancursari dalam menjalankan usahanya memiliki dasar hukum berupa Hak Guna Usaha (HGU).¹² HGU terbaru dari perkebunan ini adalah sesuai HGU Nomor 2/Tegalrejo dengan SK 17/HGU/KEM

⁹ Kebun Pancursari, Raksasa yang Sedang Tertidur. <https://www.ptpn12.com/file/buletin/edisi9/hal%207.pdf>. Diakses hari Selasa, 5 Desember 2017. Pukul 10.47 WIB.

¹⁰Karnaji. "Konflik tanah perkebunan di Malang selatan". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Th. XVI, No 4, Oktober 2003. Hlm 36

¹¹<http://www.ptpn12.com/index.php/tentang-kami/profil>. Diakses hari Selasa, 5 Desember 2015, Pukul 22.02 WIB.

¹²Bernhard Limbong.*Op. cit*Hlm. 59, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Obyek hak adalah tanah yang diusahakan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Luas minimum adalah 5 hektar, sedangkan luas maksimum adalah 25 hektar untuk perorangan, dan untuk badan usaha luas maksimumnya ditetapkan oleh menteri. Subjek hak adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

ATR/BPN/2015 tanggal 14 April 2015 yang telah terbitkan sertifikat perpanjangan.¹³ Jangka waktu HGU-nya oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 9 Juni 2015, yakni dengan masa perpanjangan hingga 31 Desember 2037. Sebelumnya, HGU kebun Pancursari berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan mulai diperpanjang pada Desember 2010.

Dengan luas perkebunan kebun Pancursari se-luas 3.031,0740 hektar membuat pihak PTPN memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan. Masyarakat sekitar perkebunan diberdayakan melalui perekrutan sebagai tenaga kerja ataupun perjanjian kerjasama pengelolaan lahan. Dalam pengelolaan kawasan perkebunan, PTPN XII menganut kerjasama usaha (KSU) yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: 13/MBU/09/2014. Peraturan ini menjadi pedoman untuk berkerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan dalam hal pengelolaan lahan perkebunan. Kebun Pancursari memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan dengan perjanjian kerjasama usaha. Didesa Tegalrejo sendiri telah terjadi kesepakatan KSU dengan masyarakat sekitar untuk menggarap lahan perkebunan seluas 48,58 hektare.

¹³ Laporan Penyerobotan tanah PTPN. <http://harianbhirawa.com/2017/06/laporan-penyerobotan-lahan-ptpn-xii-di-polres-malang-suram/>. Diakses hari selasa, 5 Desember 2017, Pukul 22.43 WIB.

Tabel 1.1
Daftar peruntukkan lahan Perkebunan Pancursari

| No | Peruntukan lahan tanam dan prasarana | Tanaman | Luas lahan |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Areal tanam | Cengkeh | 1278,13 Ha |
| | | Aneka kayu | 1106,1 Ha |
| 2 | Bangunan | Pabrik | 4,8 Ha |
| | | Perumahan Karyawan | 19,1 Ha |
| | | Lain-lain | 22,05 Ha |
| | | Tanah Tidak Dapat Ditanami | 550,4224 Ha |
| 3 | Penggunaan Lain | Garapan masyarakat | 48,58 Ha |
| Jumlah Total | | | 3.031,2 Ha |

Sumber: Diolah oleh penulis pada tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat peruntukan lahan perkebunan Pancursari. Masyarakat sekitar perkebunan telah menjalin kerjasama dengan pihak pekebunan untuk menggarap lahan sesuai kerjasama usaha. Lahan seluas 48,58 Ha telah disepakati untuk digarap masyarakat sekitar perkebunan mulai tahun 2014. Perjanjian kerjasama ini melibatkan perkebunan Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo melalui pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing.

Seiring berjalanya waktu, KSU antara PTPN XII kebun Pancursari dengan masyarakat ini menimbulkan konflik. *Pertama*, pada tahun 2016, permasalahan muncul di Desa Tegalrejo, PTPN XII beranggapan bahwa masyarakat telah mengingkari kerjasama usaha yang telah disepakati. Hal ini terbukti dengan lahan yang digarap warga yang semula 48,58 hektare membengkak menjadi 177 hektare. Hal ini membuat pihak perkebunan merugi milyaran rupiah. *Kedua*, Kasus pembakaran kebun karet juga mewarnai konflik tersebut. Sebanyak 16 ribu pohon karet dibakar oleh orang tak dikenal sehingga pihak perkebunan merugi. Akibat

kejadian ini, kerugian yang dialami PTPN XII Kebun Pancursari mencapai Rp 5,7 miliar, sebanyak 16.721 pohon karet berumur 2 tahun hingga usia 7 tahun, dibakar habis.¹⁴

Ketiga, Selain penyerobotan lahan, permasalahan yang muncul adalah bahwasanya masyarakat juga sering didiskriminasi oleh pihak perkebunan dengan para preman-premanya. Selain itu, masyarakat yang susah payah membersihkan lahan dan mulai menanaminya secara sepihak diambil alih lagi oleh pihak perkebunan. Hal ini membuat masyarakat geram, mereka belum menikmati hasil kerjanya tetapi pihak perkebunan mengambilalih lahan garapan mereka.

Dengan demikian konflik pengelolaan lahan perkebunan antara masyarakat dengan PTPN XII kebun Pancursari, dianggap cukup memprihatinkan dan belum menemukan titik temu yang kongkret dalam penyelesaiannya. Berkenaan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk memahami dan mendalami tentang konflik pengelolaan lahan perkebunan yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN XII. Alasan peneliti ingin mengambil permasalahan di atas karena ingin lebih menelisik bagaimana terjadinya konflik. Serta upaya apa saja yang dilakukan untuk menemukan penyelesaian mulai dari masyarakat, PTPN XII serta Pemerintah Daerah. Sehingga tidak menemukan titik temu yang kongkret, serta apakah yang menjadi masalah terkait penyelesaian dari konflik itu sendiri.

Selain itu peneliti juga menggunakan teori manajemen konflik sebagai upaya mendeskripsikan permasalahan konflik yang terjadi pada saat ini kedalam penulisan skripsi, dimana peneliti mengambil judul terkait pembahasan skripsi

¹⁴ http://beritajatim.com/peristiwa/312821/ribuan_pohon_karet_kebun_pancursari_ptpn_xii_dibakar_orang_tak_dikenal.html diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 17.57 WIB.

yakni *Manajemen Konflik PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Pancursari dengan Masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana identifikasi aktor yang terlibat dalam konflik PTPN XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang?
2. Bagaimana manajemen konflik perkebunan Pancursari antara PTPN XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang ingin peneliti capai dalam pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik Perkebunan Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik perkebunan Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara akademis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Melalui penelitian tentang konflik ini bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai permasalahan konflik.
2. Melalui penelitian ini dapat pula dilihat faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik serta apa saja tahapan yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini dapat dijadikan sarana evaluasi bagi lembaga Pemerintahan terkait permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.
2. Melalui penelitian ini dapat dijadikan sarana bertukar pikiran mengenai teori yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dengan permasalahan di lapangan.
3. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat sebagai sarana evaluasi atas kebijakan yang dikeluarkan.
4. Melalui penelitian ini bisa menjadi informasi bagi masyarakat tentang penjelasan terjadinya konflik yang melibatkan Masyarakat dengan PTPN XII kebun Pancursari serta sebagai referensi upaya menghadapi konflik dan penyelesaian konflik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan diuraikan tentang tiga bagian penting yang terdiri dari penelitian terdahulu, teori atau konsep, dan yang terakhir adalah alur pikir dari penelitian. *Pertama*, akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dari penelitian ini. *Kedua*, adalah teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan teori. *Ketiga*, penulis akan membahas mengenai alur pikir penelitian yang digunakan sebagai pijakan teoritik untuk mengkaji penelitian tersebut terhadap permasalahan yang akan disajikan di dalam penelitian ini. Penyajian alur pemikiran juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan dari hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh peneliti terkait konflik. Penelitian terdahulu ini akan memberikan perbedaan maupun persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk menilai keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta sebagai acuan atau sumber referensi dalam melakukan penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti sekarang lakukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian Ini

| | Nama | Judul | Pembahasan | Perbedaan |
|---|-----------------------|--|--|---|
| 1 | Fuat Hasan | Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan Di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta) | Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi perlawanan petani yang dilakukan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo Yogyakarta. | Perbedaan pada studi ini terletak pada kajian atas permasalahan yang dikaji oleh Fuat Hasan dan peneliti, Fuat Hasan sendiri mengkaji bagaimana kemunculan paguyuban petani lahan pantai (PPLP) Kulon Progo sebagai gerakan sosial yang memobilisasi perlawanan petani untuk menolak tambang pasir di Kulon Progo Yogyakarta, sedangkan peneliti lebih mengkaji manajemen konflik penyerobotan lahan perkebunan oleh Masyarakat sekitar perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Kab. Malang. |
| 2 | Kardina Ari Setiarsih | Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Pereiode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar | Penelitian ini membahas tentang konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Pereiode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen). | Perbedaan pada studi ini terletak pada permasalahan yang dikaji oleh Kardina, Kardina membahas apa faktor intern penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI sedangkan peneliti lebih menekankan |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---|
| | | Kec. Buluspesantr en Kab. Kebumen) | | bagaimana terjadinya konflik dan penyelesaianyang dilakukan oleh Pemerintah daaerah untuk penyelesaian konflik itu sendiri. |
| 3 | Deni Prasetyo | Konflik pemanfaatan mata air sumber pitu desa duwet krajan kecamatan tumpang kabupaten malang. | Penelitian ini membahas tentang konflik pemanfaatan sumber mata air sumber pitu antara petani dengan PDAM kabupaten Malang | Perbedaan penelitian ini terdapat pada terjadinya konflik permasalahan yang sudah terjadi dan mempunyai solusi dan melihat kembali bagaimana terjadinya konflik tersebut sedangkan peneliti membahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meredam konflik penyerobotan lahan. |
| 4 | Sahlan | Konflik antara masyarakat dengan pemerintah (studi kasus pada eksplorasi tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat) | Penelitian sini membahas tentang konflik masyarakat dengan Perusahaan Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat | Perbedaan penelitian ini terletak pada asal usul terjadinya konflik yang bermula dari ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan ijin pertambangan terhadap perusahaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berasal dari <i>wanprestasi</i> perjanjian Kerjasama usaha yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat sekitar. |

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber Pada Tahun, 2017

Dari sejumlah pengamatan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu yang telah dibahas oleh beberapa peneliti dan dituliskan kedalam jurnal maupun skripsi memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari segi permasalahan, teori, metode penelitian, dan pembahasan. Adanya hal tersebut telah dibuktikan dalam pencarian penelitian terdahulu yang peneliti temukan secara relevan serta berkaitan dengan tema peneliti yaitu konflik.

Adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain, *Pertama* penelitian yang dilakukan Fuat Hasan “*Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)*”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.¹⁵ Penelitian yang telah dilakukan oleh Fuat Hasan berisi tentang bagaimana strategi perlawanan yang digunakan PLPP dalam menolak tambang pasir. Adapun segala bentuk perlawanan yang pernah dilakukan demi menolak tambang pasir diantaranya melalui ranah hukum, politik, maupun aksi langsung. Sementara aksi langsung yang dilakukan oleh PLPP berupa demonstrasi ke beberapa tempat seperti DPRD, Kantor Bupati Kulon Progo, Universitas Gajah Mada, hingga sampai DPR RI.¹⁶

Letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fuat Hasan dengan peneliti terletak pada proses terbentuknya konflik yang melibatkan beberapa aktor

¹⁵Hasan Fuat. *Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan Di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016. Diakses dari, <http://digilib.uin-suka.ac.id/20074/>, pada hari Senin, 18 Desember 2017. Pukul 16.19 WIB.

¹⁶*Ibid.*, Hlm 138.

dalam permasalahan konflik yang terjadi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menelisik bagaimana terjadinya konflik antara Masyarakat dengan PTPN XII Kebun Pancursari yang disebabkan oleh penyerobotan lahan perkebunan yang menyalahi pejnjian kejasama.

Kedua, penelitian yang dilakukan Kardina Ari Setiarsih “*Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen)*”,¹⁷ penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Penelitian yang dilakukan Kardina, membahas faktor intern penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Adapun penyebab nya adalah, a) Status Kepemilikan dan Batas tanah yang tidak jelas; b) Tanaman pertanian milik masyarakat rusak akibat latihan militer; c) Perbedaan tujuan atau kepentingan dari masing-masing pihak.¹⁸

Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan Kardina dan peneliti terletak pada permasalahan yang dikaji mulai dari fokus penelitian sampai pembahasan. Selain itu peneliti akan lebih mengkaji bagaimana awal mula terjadinya permasalahan konflik penyerobotan lahan perkebunan yang melibatkan masyarakat terutama masyarakat sekitar perkebunan dengan PTPN XII Kebun Pancursari.

¹⁷Setiarsih Kardina Ari. *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. Diakses dari, eprints.uny.ac.id/18838/1/cover-daftar%20isi.pdf, pada hari Senin, 18 Desember 2017. Pukul 16.25 WIB.

¹⁸*Ibid.*, Hlm 68.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Deni Prasetyo “*Konflik Pemanfaatan Mata Air Sumber Pitu Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*”¹⁹, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Deni membahas tentang awal mula bagaimana terjadinya konflik pemanfaatan mata air sumber pitu yang ada di desa Duwet Krajan Kec. Tumpang. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh pipanisasi mata air tersebut terhadap petani di 11 desa yang menjadi dampak konflik tersebut.

Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Deni dengan peneliti terletak pada status kondisi permasalahan yang ada. Didalam penelitian, konflik masih berlangsung sehingga peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana upaya maupun proses yang dilakukan untuk meredam konflik tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan dengan judul *Konflik antara masyarakat dengan pemerintah (studi kasus pada eksplorasi tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*²⁰, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Sahlan membahas mengenai pertentangan masyarakat sekitar pertambangan mengenai eksploitasi tambang di wilayahnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Sahlan adalah asal mula terjadinya konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan bermula mengenai

¹⁹Deni Prasetyo, *Konflik Pemanfaatan Mata Air Sumber Pitu Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. Malang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 2017

²⁰Sahlan, *Konflik antara masyarakat dengan pemerintah (studi kasus pada eksplorasi tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hasanudin. 2015. Diakses dari, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15800/SKRIPSI%20LENGKAP-FISIP-SOSIOLOGI-SAHLAN.pdf?sequence=1>, padahari Selasa, 2 Januari 2018. Pukul 09.27 WIB

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan ijin Eksploitasi tambang sehingga konflik yang terjadi dikarenakan ketidaksetujuan masyarakat tentang kebijakan tersebut. Sedangkan konflik penelitian ini berawal dari *one prestasi* Kerjasama usaha antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konflik

Konflik berasal dari kata kerja *configure*, yaitu yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sendiri artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.²¹ Menurut Soerjono Soekanto(1982), "*Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan*".

Menurut Webster, istilah "*conflict*" didalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahin, peperangan, atau perjuangan"²² yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa yang dilatar belakangi oleh kepentingan sendiri. Sesuai dengan perkembangannya arti dari kata tersebut itu kemudian berkembang

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Hlm 587.

²²Lihat Webster (1966), dalam Pruitt G. Dean dan Rubin Z. Jeffrey. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011. Hlm 9.

dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Selain itu istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika semua orang memperebutkan sebuah area/wilayah, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, melainkan juga sumber daya alam didalamnya seperti air, emas, mineral, hutan serta berbagai sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Setiap kelompok sosial selalu muncul benih-benih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik, tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik *vertical*, yaitu antar pemerintah, masyarakat dan swasta, antar pemerintah pusat, pemerintah Kota dan Desa, serta konflik *horizontal* yaitu konflik antar masyarakat.

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam

proses perebutan sumber2 kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.²³

Konflik memiliki tipe-tipe. Pertama adalah tipe tanpa konflik, yaitu individu atau kelompok berada pada situasi dan kondisi yang stabil dan damai. Kedua, konflik laten yaitu situasi dan kondisi yang permasalahannya banyak, tersembunyi, agar bisa ditangani harus dibuka ke publik. Ketiga, konflik terbuka yaitu situasi dan kondisi yang permasalahannya muncul ke publik, keberadaannya nyata, dan memerlukan tindakan untuk mengatasi penyebab dan dampak dari konflik. Keempat, konflik di permukaan yaitu konflik yang muncul akibat kesalahpahaman dan dapat diatasi dengan musyawarah.²⁴

Banyak sekali upaya untuk menyelesaikan konflik. Istilah-istilah berikut menunjukkan berbagai pendekatan untuk menangani konflik, yang kadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Tahap-tahap berikut merupakan transformasi konflik sebagai gambaran situasi secara keseluruhan:²⁵

1. Pencegahan konflik. Tahap ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian konflik. Tahap ini bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik. Tahap ini bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi konflik. Tahap ini bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

²³Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta, Universitas Terbuka. 1994. Hlm 33

²⁴S.N. Kartikasari, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council Indonesia. Jakarta, 2001. Hlm 6

²⁵*Ibid.* hlm 7

5. Transformasi konflik. Tahap ini bertujuan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif

2.2.2 Teori Manajemen konflik

Konflik merupakan salah satu hal yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya konflik adalah komunikasi. Akan tetapi tidak semua konflik berawal dari sebuah komunikasi yang buruk. Berkaitan dengan hal ini menurut Myers, komunikasi adalah proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, dalam proses tersebut pasti ada konflik.²⁶ Konflik yang biasanya terjadi berupa pertentangan, pertikaian, perbedaan pendapat atau tujuan dalam memperebutkan sesuatu dan lain sebagainya.

Telah banyak ahli sosiologi yang mendefinisikan teori manajemen konflik sesuai dengan pandangan mereka guna menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satunya yaitu teori manajemen konflik menurut Marc Howard Ross. Ross berpendapat bahwa:²⁷

Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Pada konflik penyerobotan lahan perkebunan Pancursari oleh warga Desa Tegal Rejo penulis mengambil alat bantu Manajemen konflik. Tahap tahap ini

²⁶H.A. Rusdiana, 2015, *Manajemen Konflik*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm.72.

²⁷Sumaryanto, 2010, *Manajemen Konflik sebagai Salah Satu Solusi dalam Pemecahan Masalah*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 12.

penting diketahui dan digunakan untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik.

2.2.3 Manajemen konflik Marc Howard Ross strategi *Joint Problem Solving*

Penulis menggunakan Teori Manajemen Konflik dari Marc Howard Ross, menurut Ross strategi dalam memecahkan dan menyelesaikan konflik melalui *Joint Problem solving*.²⁸ *Joint problem solving* memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil akhir. Strategi ini membutuhkan penelusuran terhadap persoalan yang dihadapi. Keputusan yang diambil secara bersama dapat dikatakan berasal dari pendapat kelompok masing-masing. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini, yaitu:²⁹

1. *Identification of interests*. Kepentingan-kepentingan yang terlibat didalam konflik sangat kompleks sehingga perlu dilakukannya tahap identifikasi kepentingan secara tepat agar didapatkan kepentingan-kepentingan apa saja yang menjadi faktor utama penyebab konflik. Akan tetapi, Salah satu hambatan dalam mencari solusi konflik ini adalah tidak mampunya pihak-pihak yang terlibat menterjemahkan keluhan yang samar-samar kedalam permintaan konkrit yang pihak lain dapat mengerti dan menanggapi.³⁰

Identifikasi kepentingan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui

²⁸H.A.Rusdiana, *Op.Cit*, hlm.175.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga akan memudahkan dalam merencanakan keputusan penyelesaian konflik.

2. *Weighting interest*. Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-masing pihak memberikan penilaiannya terhadap kepentingannya. Penilaian kepentingan ini lebih menekankan pada dasar kepentingan dalam konflik. Maksudnya yaitu apakah kepentingan pihak yang terlibat dalam konflik hanya mempertimbangkan egoisme, prestise untuk memenangkan konflik ataukah kepentingan pihak lebih menekankan kepada kepentingan khalayak umum yang bersifat keadilan. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingan-kepentingan yang dihadapi pihak-pihak tersebut.³¹ Akan tetapi, kepentingan yang paling dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian adalah kepentingan umum sehingga dapat menjadi landasan pengembangan solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik.
3. *Third party assistance and support*. Seringkali dalam upaya penyelesaiannya, pihak yang terkait dengan konflik membutuhkan campur tangan pihak ketiga dalam prosesnya. Pihak ketiga ini berperan sebagai mediator untuk memberikan wadah dalam mempertemukan kedua pihak yang terlibat sengketa. Hal ini tentu saja dengan persetujuan kedua belah pihak. Kadangkala pihak ketiga ini berperan untuk menterjemahkan keluhan permasalahan yang ada, membuat saran dan solusi yang

³¹*Ibid*, hlm.176.

setidaknya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.³² Akan tetapi, kewenangan pihak ketiga hanya sampai pada disitu saja, selebihnya kekuasaan untuk menerima atau menolak solusi berada ditangan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

4. *Effective communication.* Pihak-pihak yang terlibat terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk mencapai solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi aktif untuk mengetahui apa yang dibutuhkan atau diinginkan kedua belah pihak terkait konflik.³³ Komunikasi ini sangat diperlukan untuk menggambarkan isu yang dihadapi bersama. Komunikasi efektif ini pada dasarnya dilakukan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik merasa dirugikan. Sehingga, tujuan dari komunikasi efektif ini adalah untuk menemukan keputusan penyelesaian konflik yang sesuai, dimana mungkin atau tidak mungkin menguntungkan kedua belah pihak.³⁴ Komunikasi efektif ini dapat berupa pertukaran informasi antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagai upaya untuk menghasilkan *win-win solution*.
5. *Trust that an adversary will keep agreement.* Keputusan yang diambil harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terkait harus menerima keputusan dan mentaati peraturan-peraturan sebagai hasil dari keputusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut maka sebelum keputusan dijalankan harus

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

dibuat struktur penalty atau sanksi.³⁵ Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan karena sudah ada kesepakatan bersama. Selain itu, kedua belah pihak juga mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan menjadi sebuah kerjasama yang salah satu pihaknya tak perlu ada yang melanggar persetujuan yang ditetapkan sebelumnya. Komitmen saling bekerja sama ini dapat berupa dukungan dan penegakan prosedur yang berlaku apabila ada permasalahan yang terjadi selanjutnya.

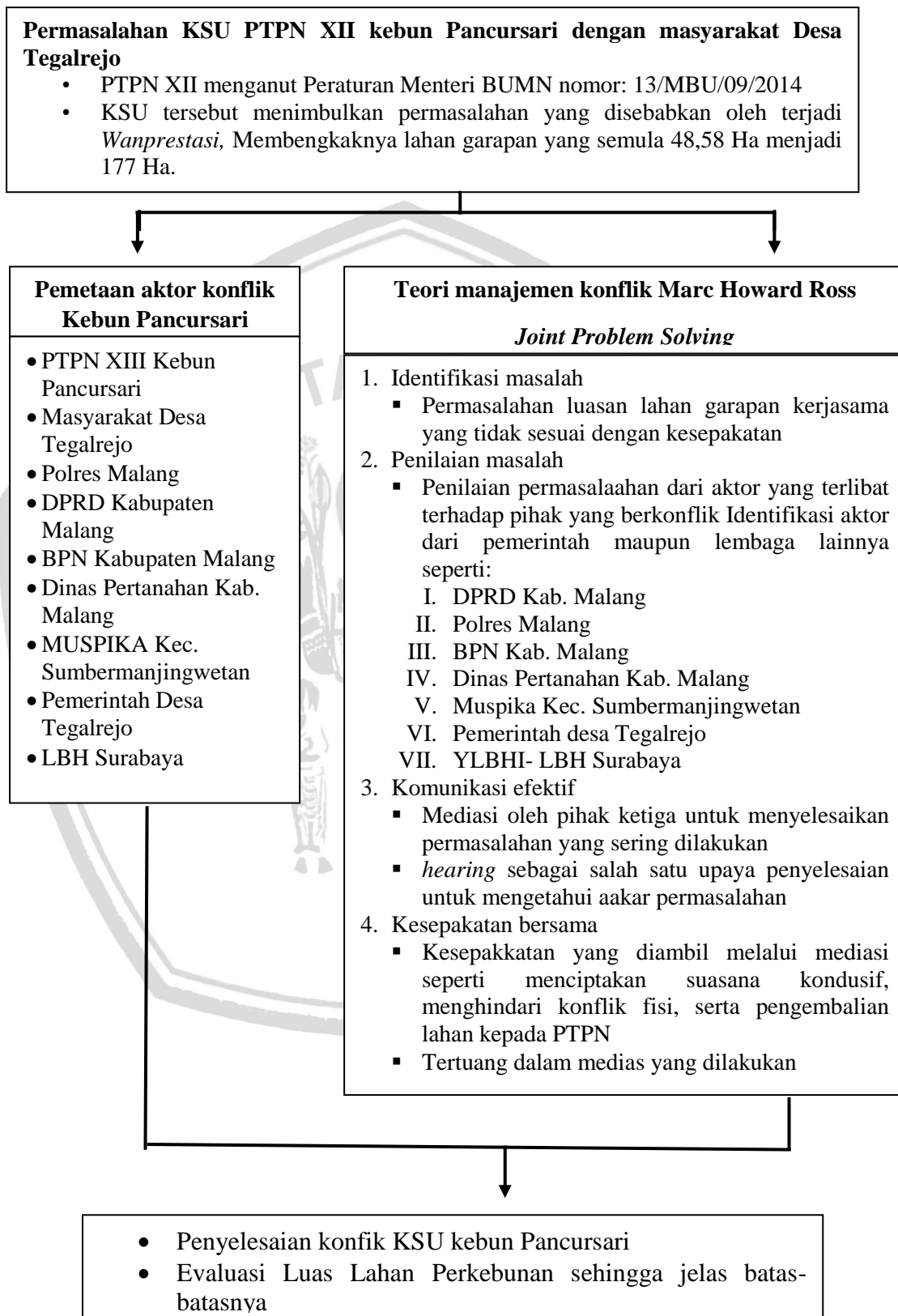
Didalam melihat sebuah fenomena konflik yang terjadi di perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, perlu dianalisis bagaimana awal terjadinya konflik tersebut. Dengan manajemen konflik dapat mengetahui bagaimana terjadinya konflik yang terjadi sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk penyelesaian konflik tersebut.

2.3 Alur Temuan Penelitian

Pada bagian ini peneliti menjelaskan terkait alur temuan penelitian yang peneliti gunakan sebagai sebuah kerangka pemikiran yang bertujuan memiliki fungsi untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan tahap demi tahap dalam proses penelitian ini.

³⁵*Ibid.*

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penjabaran dari metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, jenis data yang dipakai, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, studi pustaka. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data akan terbagi menjadi tiga cara yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada jenis data akan digunakan penggunaan data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan pembahasan teknik analisa data untuk pengamatan data yang sudah didapat.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena ingin menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai Peran pihak ketiga manajemen konflik kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegarejo. Sebagaimana teori manajemen konflik dari Marc Howard Ross yakni adanya pihak ketiga dalam penyelesaian suatu masalah.

Sementara definisi metode penelitian kualitatif itu sendiri terbilang banyak. Karena banyak sekali ahli menerjemahkannya menurut pengalaman dan pengamatan mereka. Seperti yang dicetuskan oleh Moleong, yaitu:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁶

Penggunaan penelitian kualitatif dapat mengkaji berbagai peristiwa-peristiwa yang ada. Karena melalui penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi berbagai keadaan yang terjadi seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang ada di dalam kehidupan sosial yang diteliti. Selain itu kelebihan dari penelitian kualitatif dapat menjelaskan fenomena atau peristiwa dengan lebih jelas. Bukan hanya itu sebuah fenomena mempunyai esensi lebih mendalam tidak hanya dipermukaan saja. Karena setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memaknai sebuah fenomena. Sehingga metode kualitatif ini dapat menguak sebuah maksud tersembunyi dan asal muasal mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi dan bagaimana penyelesaiannya.

3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data, informasi, serta pelaksanaan observasi yang digunakan untuk memperoleh sumber penelitian dan mencapai hasil penelitian yang valid, maksimal, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Lokasi penelitian berada di PTPN XII Kebun Pancursari, masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, serta SKPD di Kabupaten Malang yang terkait dengan konflik perkebunan Pancursari tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif ini selanjutnya dideskripsikan berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan.

³⁶Haris, Herdiansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Himanika. Hlm: 9

Sedangkan fokus penelitian menentukan pembahasan penelitian yang mencakup hal-hal penting dalam penelitian. Dalam fokus penelitian diperlukan penjelasan sehingga pengukuran sebuah penelitian jelas. Fokus penelitian digunakan sebagai batasan peneliti agar pembahasan bersifat rinci, spesifik, tegas, dan pasti dengan data yang menjelaskan maksud dan tujuan serta hasil pembahasan dari penelitian ini memfokuskan kepada manajemen konflik lahan perkebunan Pancursari di kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.

3.3 Jenis Data

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini memiliki dua jenis data yang akan digunakan yaitu, data primer dan sekunder. Kedua jenis data tersebut saling berkaitan satu sama lain terutama data sekunder yang bersifat menguatkan data primer. Berikut ini akan dijelaskan mengenai data primer dan data sekunder:³⁷

- (a) Data primer adalah data yang berasal dari teks wawancara yang diperoleh berasal dari kegiatan wawancara kepada informan yang merupakan sampel dalam kegiatan penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara merekam menggunakan alat dan dicatat manual oleh peneliti.
- (b) Data Sekunder merupakan data-data yang sudah ada, dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Biasanya data sekunder berasal dari data-data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah: 1) data bentuk teks: dokumen, pengumuman, surat-surat, dan sependuk; 2) data bentuk gambar: foto, animasi, dan *billboard*; 3) data bentuk suara: hasil rekaman kaset; 4) Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan di televisi.

Maka melalui penggolongan jenis data primer dan sekunder ini peneliti akan lebih teliti dalam strategi penggalan data-data untuk memperkuat referensi penelitian ini. Hal ini diperlukan karena sumber data primer yang berasal dari hasil

³⁷Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm: 209

wawancara juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa tulisan ataupun visual

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ada beberapa metode pengumpulan data yang umum dilakukan. Beberapa metode tersebut yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan metode pengumpulan data tersebut:

3.4.1 Wawancara

Kegiatan wawancara adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Dalam kegiatan ngobrol dengan teman sehari-hari sebenarnya terdapat proses wawancara disana. Namun kebanyakan orang tidak menyadarinya. Asumsi kebanyakan orang adalah kegiatan perbincangan yang bersifat formal. Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode wawancara untuk bertanya langsung kepada narasumber untuk menggali informasi.

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara merupakan suatu bentuk utama dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Sehingga penelitian ini memprioritaskan pengumpulan data melalui teknik wawancara yang ditujukan kepada beberapa narasumber narasumber yang terlibat dalam proses manajemen konflik. Didalam melakukan wawancara, peneliti juga mendapat arahan dari narasumber lainnya untuk menggali informasi lebih jauh. Seperti narasumber Ari Ismanto yang

merekomendasikan Polres Malang yang mempunyai peran penting dalam Penyelesaian kasus ini.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Suhendra, S.H, MH. | Bidang Hukum Dinas Pertanahan Kabupaten Malang |
| 2 | Heny Sulistyowati | Kepala Bidang Permasalahan, Konflik dan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang |
| 3 | Drs. Didik Gatot Subroto | Komisis A DPRD Kabupaten Malang |
| 4 | Sunardi Riyono, S.H. | Kepala Bagian Ops Polres Malang |
| 5 | Agus Harianto, S.Sos., M.AP. | Camat kecamatan Sumbermanjing Wetan |
| 6 | Ari Ismanto | Kepala Desa Tegal Rejo Kecamatan Sumbermanjing/ koordinator penyewa Lahan |
| 7 | Nanang | KAUR Pemerintahan Tegal Rejo Kecamatan Sumbermanjing |
| 8 | Hendro | Manajer Kebun Pancursari |
| 9 | Wiji | Sekretaris Desa Tegalrejo |
| 10 | Hosna | Kepala Bidang Penanganan kasus ekosistem, pertanahan YLBHI-LBH Surabaya |

Sumber: Hasil olahan penulis tahun 2018

Adanya pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang telah disebut satu-persatu diatas.Hal ini diharapkan dapat memberikan data yang digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti.

3.4.2 Observasi

Penelitian dalam metode kualitatif membutuhkan teknik observasi. Karena melalui teknik ini akan dilakukan pencatatan secara sistemik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan

dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung.³⁸ Menurut Banister, *et al* observasi berarti memperlihatkan dan mengikuti; memperhatikan dan mengikuti dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Sedangkan *Cartwright* mengartikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.³⁹

Dengan kata lain observasi adalah pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kegiatan sosial yang sedang diteliti. Teknik observasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pencarian data sebanyak mungkin secara sistemik kemudian dilakukan analisa yang mendalam dengan cara memilah dan melakukan penyempitan data. Sehingga data observasi tersebut menjadi terfokus, kemudian terlihat pola-pola perilaku dan hubungan obyek yang diteliti.

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti disini adalah dengan datang langsung kelokasi perkebunan PTPN XII kebun Pancursari, Desa Tegalrejo, mengikuti pemaparan pihak yang terkait konflik serta mengikuti jalannya sidang. Peneliti juga melihat bagaimana kondisi perkebunan, masyarakat Desa Tegalrejo yang terlibat konflik perkebunan. Kemudian peneliti juga mendokumentasikan lahan yang menjadi sengketa berdasarkan peta perkebunan. Dengan demikian, kegiatan observasi ini menjadi data pembantu untuk melihat manajemen konflik perkebunan Pancursari tersebut.

³⁸*Op,Cit.* Jonathan Sarwono. Hlm: 224.

³⁹Heris Herdiansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 131

3.4.3 Kajian Dokumentasi

Setelah penggunaan teknik wawancara dan observasi penambahan teknik pengumpulan data yaitu dengan kajian dokumen. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca dokumen kerja sama usaha antara PTPN XII dengan masyarakat Desa Tegalrejo.

Didalam dokumen tersebut berisi tentang awal mula sejarah lahan, terbinya HGU dan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat meghimpun sejumlah data tanpa mengganggu obyek narasumber atau suasana penulisan. Karena dengan mendapat dokumen-dokumen secara tertulis tersebut dapat dilakukan analisa sendiri tanpa meminta bantuan narasumber dan orang lain.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti laporan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Beberapa data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁴⁰

Dokumentasi masuk dalam kategori jenis sekunder dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperkuat

⁴⁰Lisa Harrison, 2009. *Metode Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 104

penelitian dengan didukung oleh data-data yang konkret dan kuat dari pihak yang terkait. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi itu menjadi penting, karena teknik ini merupakan penyempurna dari metode wawancara, angket dan observasi sebagai penelitian kualitatif. Menurut pandangan Guba dan Lincoln, beranggapan bahwa teknik dokumentasi ialah sumber yang stabil, kaya dan mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.⁴¹

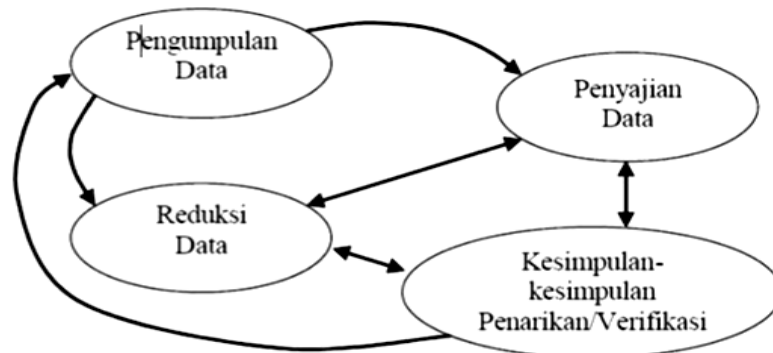
3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuat keputusan.⁴² Kemudian analisis data dilakukan sebagai teknik akhir yang menentukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada teknik ini, data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sedemikian rupa hingga mampu menguji dan membuktikan hipotesis peneliti. Berikut alur analisis data yang digunakan peneliti:

⁴¹Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 5

⁴²Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Hlm. 253.

Bagan 3.1
Alur Analisis Data



(Sumber: Sugiyono (2008:247))

Perolehan data yang didapat dari lapangan berjumlah cukup banyak sehingga memerlukan reduksi data sebagai sebagai teknik analisisnya. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk kemudian dicari tema dan polanya.⁴³ Sehingga mempermudah peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas dari data-data yang telah dikumpulkan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilahnya secara manual, atau dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada kriteria-kriteria tertentu.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan pertama penelitian, yaitu memperoleh dan menghimpun data-data yang ada di lapangan. Tidak ada batasan waktu dalam pengumpulan data karena sepanjang penelitian masih berlangsung maka kegiatan pengumpulan data dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini masih belum ada pembagian data sekunder dan primer sehingga perlu adanya

⁴³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008. Hlm. 247.

proses pemilahan data. Pengumpulan data mulai dari identifikasi masalah terhadap penyebab munculnya konflik di kebun Pancursari sampai proses upaya penyelesaiannya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti mencari aktor-aktor yang terlibat serta informan-informan yang mempunyai kendali dalam permasalahan kasus ini. Data data yang diperoleh antara lain data data mengenai hasil wawancara dengan aktor yang terlibat, kajian dokumentasi situasi dan kondisi lahan perkebunan, serta yang paling penting adalah surat perjanjian KSU antara pihak perkebunan dengan masyarakat Desa Tegalrejo.

2. Reduksi Data

Proses ini akan di lakukan setelah mendapatkan data-data diatas pengumpulan kemudian, data yang diperoleh diubah bentuk menjadi tulisan dan dikategorikan sesuai fokus pembahasan masing-masing serta sesuai dengan teori manajemen konflik Marc Howard Rss yang di gunakan. Setelah itu, peneliti akan mereduksi data atau memilah-memilah data yang kemudian digabungkan dan dihubungkan dengan data yang telah dipilah agar mempermudah tahapan atau proses selanjutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah deskripsi dari kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Penyajian data didapat dari pengumpulan data. Pada proses ini, peneliti akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti transkrip wawancara, mengklasifikasikan data-data, kemudian disertakan dalam hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan proses verifikasi dari data-data yang telah di seleksi pada tahap sebelumnya yang kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian⁴⁴. Penarikan kesimpulan menjurus pada jawaban dalam rumusan masalah.



⁴⁴*Ibid.* Hlm. 252.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN, PERAN SERTA AKTOR YANG TERLIBAT MANAJEMEN KONFLIK KEBUN PANCURSARI

Pada bab IV ini, peneliti ingin menjabarkan gambaran umum serta sejarah konflik. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan geografis PTPN XII kebun Pancursari serta sejarah lahan perkebunan, yaitu lahan kebun Pancursari dan lahan Desa Tegalrejo, serta sejarah konflik lahan. Beberapa sub bab tersebut akan menjelaskan mengenai awal mula sejarah lahan perkebunan serta cikal bakal desa dan sejarah awal mula konflik yang terjadi.

4.1 Gambaran umum dan lokasi Penelitian

Lokasi kebun Pancursari milik PTPN XII tersebut berada di Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang, yang berjarak 62 km arah selatan Kota Malang. Areal konsesi kebun Pancursari seluas 3.031,0740 hektar terdiri dari dua bagian masing-masing bagian Pancursari seluas 1.687,6711 ha dan bagian Sumberjeru 1.343,4029 ha.⁴⁵

Perkebunan Pancursari merupakan perkebunan bekas kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, perkebunan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nasionalisasi No. 86 th. 1958/jo/ PP. No 19 tahun 1959.⁴⁶ Semua aset

⁴⁵ *Kebun Pancursari, Raksasa yang Sedang Tertidur.* <https://www.ptpn12.com/file/buletin/edisi9/hal%207.pdf>. Diakses hari Selasa, 5 Desember 2017. Pukul 10.47 WIB.

⁴⁶Karnaji. "Konflik tanah perkebunan di Malang selatan". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Th. XVI, No 4, Oktober 2003. Hlm 36

dipindahkan ke pemerintah Indonesia dan dijalankan oleh Negara Indonesia. Perkebunan Pancursari ini dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII). PTPN XII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang pelebunan PT Perkebunan Nusantara XXIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XXVI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara XXIX (Persero) yang dituangkan dalam Akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 1996.⁴⁷

Sementara itu Desa Tegalrejo sendiri berada di kecamatan Sumbermanjingwetan yang berjarak sekitar 60 km dari kota Malang. Desa ini terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 2.981 jiwa.⁴⁸ Desa Tegalrejo sendiri berbatasan dengan beberapa desa, disebelah utara berbatasan dengan Desa Sekarbanyu, selataan Desa Tambaksari, barat dengan Desa Ringinkembar dan timur dengan Desa Sukodono kecamatan Dampit.

4.2 Sejarah Lahan

4.2.1 Pada Jaman Kolonial Belanda

Sebelum menjadi Desa Tegalrejo, lahan di daerah tersebut merupakan lahan perkebunan yang dikuasai oleh Belanda selama beberapa puluh tahun. Lahan tersebut dikuasai oleh pemerintahan Kolonial Belanda dan dijadikan perkebunan untuk usaha dagang Belanda. Ada 3 perusahaan milik Belanda yang menguasai lahan seluas 4.477,2964 Ha, yaitu:

⁴⁷<http://www.ptpn12.com/index.php/tentang-kami/profil>. Diakses hari selasa, 5 Desember 2015, Pukul 22.02 WIB.

⁴⁸Laporan profil Desa Tegalrejo pada tahun 2015

- a. *N.V. QOST JAVA RUBBER MIJ*, Status hukum perusahaan ini dicabut sejak tanggal 3 Desember 1957 dan dinasionalisasi berdasarkan undang-undang nomor 86 tahun 1958⁴⁹. Semua aset-aset yang dimiliki oleh perkebunan ini jatuh dan diberikan kepada PT. Perkebunan XXIII dan menjadi tanah Negara.
- b. *N.V. KOFFIE CULTUUR* Sumberkerto, luas wilayah perusahaan ini seluas 978,3649 ha, sebagian areal seluas 463,8560 ditegaskan menjadi obyek *landreform* dalam rangkaian untuk diretribusi kepada petani-petani penggarap⁵⁰.
- c. *N.V CULTUUR MIJMALANG*
- Tanaman yang dikelola oleh 3 perusahaan milik Pemerintahan Kolonial Belanda tersebut adalah karet dan kopi. Tanaman tersebut merupakan komoditi utama untuk diekspor ke Eropa. Dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit, tidak heran di daerah tersebut sangat cocok untuk ditanami pohon kopi dan karet.

4.2.2 Awal Kemerdekaan

Pada tahun 1942 dalam perang dunia, Pemerintahan Kolonial Belanda meninggalkan Indonesia dikarenakan kalah perang dengan Jepang. Dalam masa transisi kekuasaan, lahan perkebunan sempat digarap oleh masyarakat untuk ditanami pangan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, Jepang mengambil alih semua lahan bekas jajahan Belanda. Kebun-Kebun yang

⁴⁹Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4-VIII-1996 Tentang Pembatalan secara parsial keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII berdasarkan surat keputusan Meteri dalam negeri No. 35/HGU/DA/88

⁵⁰*Ibid.*

sudah ada di tanami tanaman untuk keperluan perang jepang melawan sekutu. Tanaman kapas, jarak, rami adalah tanaman untuk keperluan perang jepang. Masyarakat dipekerjaan sebagai buruh dan pekerja keras untuk keperluan kemenangan perang Jepang. Pada tahun 1945, dalam perang dunia kedua Jepang kalah perang dan sehingga Jepang harus meninggalkan Indonesia. Dengan momentum itu, Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Para pejuang bangsa dan masyarakat Indonesia menguasai kembali areal lahan perkebunan tersebut. Dengan semangat kemerdekaan, masyarakat menguasai lahan dan menanaminya dengan tanaman pangan. Singkong, jagung, ketela, bote adalah tanaman yang ditanam untuk kepentingan mendukung perjuangan kemerdekaan dan pangan rakyat.

Para pejuang dan masyarakat dengan leluasa menggarap lahan perkebunan tersebut tanpa ada yang menghalang-halangi. Hasil panen yang didapat hanya untuk kepentingan mempertahankan kemerdekaan serta menunjang pangan masyarakat. Lahan yang digarap masyarakat pada waktu itu hanya sebesar 506,36 hektar dari luasan perkebunan yang ada⁵¹. Selama bertahun-tahun masyarakat memanfaatkan lahan perkebunan tersebut tanpa ada permasalahan.

Pada tahun 1949, Bupati Malang mengeluarkan Keputusan Nomor 5703/13/BB tentang dibentuknya Desa darurat Tegalrejo pada tanggal 31 Desember 1949⁵². Keputusan ini diambil untuk memperlancar jalannya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah

⁵¹Laporan sejarah dan profil Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing wetan Kab. Malang

⁵²*Ibid.*

terbentuk Desa darurat, jalannya roda pemerintahan mulai berfungsi dan masyarakat bersemangat mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat menggarap lahan perkebunan bekas Pemerintahan Kolonial dengan memperoleh perlindungan dari pemerintah Desa.

4.2.3 Terbitnya Hak Guna Usaha

Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No.86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perkebunan milik Belanda di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya UU tersebut, maka pemerintah Indonesia mengambil alih tanah tanah bekas perkebunan. Masyarakat diharuskan mengembalikan tanah-tanah yang digarap untuk diserahkan ke pemerintah. Meskiun dengan berat hati, masyarakat merelakan tanah yang digarap selama belasan tahun tersebut.

Dengan dikeluarkannya UU No 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi, maka sebagian *ex* tanah perkebunan dikelola oleh P.P.N Antan dan P.P.N Karet XV⁵³. Sejak tahun 1945 sampai dengan 1958, sebagian areal perkebunan digarap oleh masyarakat Desa Darurat Tegalrejo dan sejak tahun 1958 sebagian dikerjakan oleh P.P. Antan dan P.P.N Karet XV. Sebagian masyarakat beralih profesi menjadi pekerja di PT Perkebunan XXIII (Persero) Kebun Pancursari sebagai pekerja kasar dengan upah yang sangat tidak mencukupi. Karena kehilangan mata pencaharian dan lahan garapan masyarakat mengalami penderitaan lahir batin sampai dengan saat ini.

⁵³*Ibid.*

Pada tahun 1968, P.P.N Antan dan P.P.N Karet XV berdasarkan PP nomor 14 Tahun 1968, kedua PPN digabungkan menjadi PT Perkebunan XXIII Surabaya. Dengan bergabungnya kedua perusahaan tersebut, maka pada tahun 1988, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 35/HGU/88 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XXIII, Surabaya⁵⁴. HGU ini muncul atas permohonan hak guna usaha oleh PT. Perkebunan XXIII atas tanah sumberjeru seluas 2.370,22 Ha yang terletak diwilayah Sumbermanjing wetan. Dengan terbitnya HGU pada tahun 1988, maka PTPN XXIII berhak menguasai lahan tersebut selama 25 tahun kedepan dan berakhir pada tahun 2012.

4.2.4 Tahun 90 Sampai Sekarang

Dengan terbitnya HGU untuk PTPN, Masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka mengajukan permohonan lahan garapan kepada pemerintah melalui rembuk Desa dan diajukan kepada Bupati. Pada awal tahun 1992, terbit Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 181.135/692/SJ Tanggal 07 Maret 1992 Kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Perihal masalah tanah garapan warga Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Masyarakat Desa Tegalrejo menerima lahan Garapan kurang lebih 0,5 Hektar untuk 598 Kepala Keluarga namun berdasarkan aturan bahwa yang mendapatkan lahan garapan adalah yang menikah di bawah tahun 1980 dan untuk yang menikah di atas tahun 1980 yang berjumlah 269 Kepala Keluarga tidak mendapatkan lahan garapan.

⁵⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35/HGU/88 Tentang Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XII

4.3 Sajarah Konflik lahan di wilayah Kebun Pancursari

4.3.1 Awal Kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia kedua, Lahan Perkebunan diambil oleh masyarakat setempat. Masyarakat menggarap lahan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun masyarakat bebas menggarap lahan tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk bercocok tanam singkong, ketela pohon dan tumbuhan lainnya untuk makanan sehari-hari.

4.3.2 Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Desa Tegalrejo

Setelah Negara Indonesia merdeka, Bupati Malang mengeluarkan surat keputusan dibentuknya desa darurat No. 5703/13/BB pada tanggal 31 Desember 1949. Pembentukan desa darurat ini berguna untuk memudahkan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada beberapa tujuan dibentuknya Desa darurat Tegalrejo pada tahun 1949,⁵⁵

- a. Menunjang kepentingan mempertahankan kemerdekaan serta memperlancar jalannya roda Pemerintahan
- b. Pengangkatan Pamong Desa yang lainnya
- c. Menetapkan jenjang krawat desa
- d. Mengatur Batas-batas Desa

⁵⁵Laporan Desa Tegalrejo mengenai Sejarah tanah Desa Tegalrejo

e. Menetapkan bengkok Pamong Desa

f. Menetapkan Adat atau peraturan-peraturan Desa

Setelah roda pemerintahan berjalan, masyarakat bersemangat menggarap lahan dari perkebunan dengan leluasa. Masyarakat memperoleh perlindungan dari pemerintah Desa Darurat Tegalrejo tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Selama bertahun tahun masyarakat menggarap lahan bekas perkebunan tersebut. Namun, setelah pemerintah pusat mengeluarkan UU no 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perkebunan belanda diseluruh Indonesia, maka masyarakat mengembalikan lahan garapan mereka yang selama bertahun tahun sudah mereka kuasai. Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, semua lahan garapan di ambil alih oleh P.P.N Antan dan P.P.N Karet XV.

Pada tahun 1970, Desa darurat Tegalrejo mengadakan rembuk Desa untuk menajukan permohonan tanah garapan. Masyarakat dengan pemeintah Desa mengupayakan kepada bupati Malang untuk diberikan tanah. Dan hal itu direspon oleh bupati dan diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur. Namun masyarakat harus menunggu lama untuk memperoleh apa yang diinginkan masyarakat pun membuahan hasil, dengan SK Gubernur nomor DA/218/SK/H.M/1980 per anggal 18 Oktober 1980, telah dikeluarkan Hak Milik atas tanah perumahan *ex* petani penggarap tiap kepala keluarga sebesar 500 m2. Pada tahun 1980, tepatnya tanggal 21 oktober 1980, Desa Tegalrjo diresmikan menjadi Desa resmi berdasarkan SK Gubernur nomor 419/12/011.

Pada tahun 1988, keputusan menteri dalam negeri nomor 49/HGU/DA/1988 pada tanggal 18 Juni tentang pemberian HGU atas nama PTPN XII Surabaya. Setelah tebit HGU Kebun Pancursari tersebut membuat masyarakat semakin kehilangan arah untuk mendapatkan lahan garapan. Hal ini di karenkan, masyarakat tidak kuat secara hukum menghadapi pihak kebun.

4.3.3 Pembatalan Parsial 1996

Pembatalan parsial merupakan suatu keputusan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VIII-1996 tentang Kebijakan pelaksanaan penataan kembali areal perkebunan dalam perusahaan PT. Perkebunan XXIII, yang telah memperoleh HGU berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 35/HGU/DA/88, terletak di kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Keputusan ini diambil karena banyaknya tumpang tindih peraturan dalam satu wilayah perkebunan.

Tumpang tindihnya peraturan ini membuat adanya celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menguasai perkebunan. Seperti peraturan-peraturan dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron sehingga dibuatlah dikeluarkanlah peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VIII-1996 tentang Kebijakan pelaksanaan penataan kembali areal perkebunan dalam perusahaan PT. Perkebunan XXIII, yang telah memperoleh HGU berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 35/HGU/DA/88 dan dikeluarkanlah peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4-VIII-1996 tentang pembatalan secara parsial keputusan

pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri Nomor 35/HGU/DA/88.

Pada peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasinoal No. 3-VIII-1996 berisi tentang⁵⁶,

1. Menata kembali penguasaan tanah dan penggunaan tanah perkebunan oleh PT. Perkebunan XXIII seluas kurang lebih 1.863,86 Ha
2. Penataan kembali tersebut dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan tertib penguasaan dan penggunaan tanah
3. Penataan kembali dilaksanakan melalui,
 - a) Pembatalan parsial pemberian HGU dan diikuti pengukuran kembali batas-batas yang dibatalkan maupun tidak
 - b) Identifikasi obyek *landreform* dan tanaman berharga milik PT. Perkebunan XXIII serta penetapan ganti ruginya
 - c) Pelepasan hak milik pada areal pemukiman yang nantinya akan kembali menjadi tanah Negara
 - d) Penetapan obyek *landreform* untuk pemukiman dan areal pertanian sebanyak 1551 kk melalui konsolidasi dan retribusi hak milik
 - e) Pembongkaran dan pemindahan perumahan warga sebanyak 1551 kk dipindahkan ke obyek *Landreform*
 - f) Penyerahan sertifikat secara masal kepada petani dan PT. Perkebunan XXIII

Sementara untuk peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasinoal No. 4-VIII-1996 tentang pembatalan secara parsial keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri Nomor 35/HGU/DA/88 berisi tentang⁵⁷,

⁵⁶Peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasinoal No. 3-VIII-1996 tentang Kebijakan penataan kembali areal perkebunan dalam perusahaan PT. Perkebunan XXIII, yang telah memperoleh HGU berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 35/HGU/DA/88

⁵⁷peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasinoal No. 4-VIII-1996 tentang pembatalan secara parsial keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri Nomor 35/HGU/DA/88.

1. Membatalkan secara parsial keputusan Menteri dalam negeri tanggal 19 April 1988 nomor HGU/35/DA/88 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXIII
2. Pembatalan tersebut ditetapkan pada areal tumpang tindih pada sebagian arel bekas hak *erfpacht* verp. Nomor 982, 1038 dan 983 yang saat ini berstatus hak milik 1551 kk
3. Pembatalan tersebut ditetapkan pula pada areal tumpang tidih bekas hak *erfpacht* verp. Nomor 784, 984, dan 1187 yang saat ini masih milik PT. Perkebunan XXIII
4. Areal yang tidak tumpang tindih tetap diberikan HGU kepada PT. Perkebunan XXIII
5. Mengintruksikan kepada kepala kantor BPN provinsi Jawa Timur dan BPN Kabupaten Malang untuk melaksanakan identifikasi dan pengukuran beserta inventaris tanaman berharga milik PT. Perkebunan XXIII pada areal tumpang tindih.

4.3.4 Kerjasama Usaha PTPN XII Dengan Masyarakat

Didalam menjalankan usahanya dalam mengelola lahan perkebunan PTPN XII kebun Pancursari menerapkan sistem kerjasama. Sistem kerjasama ini dilakukan untuk memperdayakan masyarakat sekitar untuk berperan dalam mengolah lahan. Selain memperdayakan dengan dipekerjakannya di dalam kebun, mereka juga ditawari kerjasama usaha dengan cara penggarapan lahan perkebunan dengan sistem sewa selama satu tahun.

Kegiatan yang dilakukan perkebunan ini bukan tanpa alasan, hal ini sudah tertuang di dalam peraturan Menteri BUMN Nomor 13/MBU/09/2014. Peraturan ini mengatur bahwa PTPN boleh menyewakan lahannya untuk masyarakat sekitar yang ingin mengolah lahan Negara tersebut. Dengan adanya payung hukum tersebut, Kebun Pancursari memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk bekerja sama dalam mengolah lahan kebun Pancursari. Seperti yang diungkapkan oleh manajer kebun pancursari

bahwa *“jadi di BUMN, pancursari itu ada ksu, kerjasama usaha dengan salah satu mitra dengan tenggang waktu selama 1 tahun”*⁵⁸

Didalam kerjasama usaha tersebut, mempunyai jangka waktu 1 tahun dan dapat dilakukan pengajuan perpanjangan kembali oleh mitra kebun. Objek dari kerjasama tersebut adalah pemanfaatan sebagian areal HGU kebun pancursari. Lahan tersebut nantinya diperuntukkan untuk budidaya tanaman yang telah ditentukan selama jangka waktu 12 bulan.⁵⁹ Tanaman yang telah disepakati adalah penanaman lahan garapan berupa tanaman tebu.

Perjanjian kerjasama antara PTPN XII Kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo ini berawal dari tahun 2014. Awal mula terbentuknya KSU ini berawal dari keprihatinan masyarakat Desa Tegalrejo itu sendiri. Mereka dengan perekonomian yang sulit ingin sekali mempunyai tanah garapan untuk menyambung hidup. Mereka melihat warga Desa lain bisa menyewa lahan PTPN, sedangkan kebun Pancursari berada di Desa mereka. Hal ini membuat masyarakat berinisiatif untuk mengajukan KSU dengan cara menyewa lahan perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari.

Pada awal tahun 2014, KSU antara Kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo dengan penanggung jawab Kepala desa Tegalrejo yaitu Ari ismanto mempunyai kesepakatan. Awal mula perjanjian KSU dengan luasan lahan 40,8 Ha. Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat desa Tegalrejo adalah sebesar Rp. 8000.000,00/ Ha, harga tersebut adalah harga kesepakatan

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Hendro selaku Manajer Kebun Pancursari di Kantor Kebun Pancursari, pada tanggal 3 Juli 2018. Pukul 09.45 WIB.

⁵⁹Surat perjanjian KSU PTPN XII Kebun Pancursari dengan Ari ismanto

antara pihak kebun dengan masyarakat yang dikoordinatori oleh Ari ismanto. Awal terjadinya konflik antara pihak Perkebunan dengan masyarakat penyewa lahan dikarenakan ada kesalah pahaman diantara kedua belah pihak mengenai luas wilayah dan pembayaran KSU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun pada awal tahun 2015, permasalahan muncul dengan ketidakpuasan masyarakat akan hasil tanam mereka. Hal ini menimbulkan tertunggaknya pembayaran KSU. Selain itu adanya tindakan dari masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian yang dilakukan oleh pihak perkebunan karena adanya penyerobotan lahan karena tidak membayar sewa lahan yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan masyarakatpun bertindak dengan membakar lahan milik perkebunan yang ditanami pohon karet. Dengan tindakan warga tersebut membuat permasalahan ini menjadi besar dan pihak perkebunan pun mengambil jalur hukum untuk mengatasi permasalahan pembakaran tersebut.

4.3.5 Konflik Kerjasama usaha

Permasalahan KSU Pancursari mulai terjadi pada tahun 2015. Dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak perkebunan dengan masyarakat Desa Tegalrejo terjadi kesepakatan pengolahan lahan desa cara sistem sewa lahan. Sistem sewa lahan ini di buka satu pintu untuk masyarakat desa Tegalrejo yaitu di koordinatori Kepala Desa Ari Ismanto. Pancursari menerapkan ini bukan karena tanpa alasan, hal ini memudahkan untuk pertanggungjawaban oleh mitra kebun.

Pada tahun 2014, perjanjian KSU antara Ari Ismanto dengan pihak Pancursari ditandatangani sewa lahan seluas 40,8 Ha. Dalam pengakuan pihak manajer kebun tersebut merupakan lahan tebu, namun menurut masyarakat lahan tersebut merupakan terlantar dan semak belukar. Hal inilah salah satu munculnya permasalahan. Menurut Ari ismanto *“Pihak perkebunan menyewakan lahan, tapi awal mula lahan masih semak belukar dan saya membersihkan lahan itu sendiri”*⁶⁰. Di konfirmasi kepihak perkebunan mengenai lahan tersebut merupakan lahan terlantar atau bukan, pihak perkebuna yaitu Manajer kebun Pancursari menyangkalnya. Menurut Hendrianto manajer Kebun Pancursari megungkapkan bahwa⁶¹,

“Bukan, jadi begini lahan yang kita KSU kan itu adalah lahan untuk dikonveksi, untuk pancursari kita karet sama cengkeh. Disitu ada lahan tunggu. Tanaman tahun akan datang, ditanaman perkebunan itu kalau karet TBAD X-1, TITIK I baru TBM istilahnya, Untuk H-1 tahun lahan tersebut terbuka, pemanfaatan itu bukan lahan terlantar, melainkan lahan tunggu. Jadi kita KSU kan satu dua tahun baru kita Tarik. Sebelum menanam karet, tanah perlu dikosongan atau dibuka, jadi memang tanah tersebut kita biarkan terbuka dan kita KSUkan. Bukan satu kita birkan”

Dari pernyataan manajer Pancusari diatas dapat dilihat dan diartikan bahwa lahan tersebut digunakan untuk tanaman perkebunan. Lahan tersebut akan digunakan untuk tanaman pohon karet. Sebelum menanam pohon karet, lahan tersebut akan dibiarkan selama dua tahun untuk manajemen tanam. Selama menunggu proses penyiapan bibit serta manajemen tanam, lahan tersebut di KSU kan agar tanah tersebut tetap produktif.

⁶⁰Wawancara dengan Ari Ismanto selaku kepala Desa Tegalrejo dan Koordinator masyarakat penyewa lahan di rumah Ari Ismanto, pada tanggal 28 februari 2017. Pukul 08.20 WIB.

⁶¹Wawancara dengan Hendro, *Op.cit*

Namun pada awal tahun 2015, permasalahan muncul dengan ketidakpuasan masyarakat akan hasil tanam mereka. Hal ini menimbulkan tertunggaknya pembayaran KSU. Selain itu adanya tindakan dari masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian yang dilakukan oleh pihak perkebunan karena adanya penyerobotan lahan karena tidak membayar sewa lahan yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan warga Desa Tegalrejo membakar pohon karet milik perkebunan Pancursari.



BAB V

MANAJEMEN KONFLIK PERKEBUNAN PTPN XII KEBUN PANCURSARI

Secara garis besar bab lima ini menjawab semua rumusan masalah yang ada pada bab pertama, yaitu terkait proses terjadinya konflik Kerjasama PT. Perkebunan Nusantara XII kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dan kemudian mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut. Manajemen Konflik PT. Perkebunan Nusantara XII kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dianalisis menggunakan teori Manajemen Konflik oleh Marc Howard Ross. Dengan menggunakan teori tersebut, peneliti mencoba menganalisis hasil temuan lapangan untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

5.1 Identifikasi Aktor

Dalam permasalahan perkebunan Pancursari, terdapat beberapa aktor yang terlibat baik dalam proses konflik maupun dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Setiap aktor mempunyai tugas dan tujuan tersendiri dalam keterlibatannya. Berikut dibawah ini merupakan aktor-aktor yang berperan aktif dalam proses awal mula konflik sampai proses penyelesaian permasalahan.

Tabel 5.1
Pemetaan aktor Manajemen Konflik Kebun Pancursari

| No | Aktor | Kewenangan | Strategi/cara mencapai tujuan | Kepentingan tujuan yang ingin dicapai |
|----|---------------------------------------|--|--|---|
| 1 | PTPN XII Kebun Pancursari | <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik Lahan - Pembuat KSU | <ul style="list-style-type: none"> - Menempuh jalur hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan KSU sesuai perjanjian yang telah disepakati |
| 2 | Masyarakat Penyewa lahan | <ul style="list-style-type: none"> - Penggarap Lahan - | <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan KSU kepada PTPN | <ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan masyarakat |
| 3 | Polres Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Penegak Hukum - Aktor ketiga dalam penyelesaian permasalahan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Mediasi - Penerjunan personil di lapangan | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga ketertiban di masyarakat |
| 4 | DPRD Kabupaten Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Wakil rakyat dan wakil Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan mediasi - Menyerap aspirasi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga ketertiban di masyaakat |
| 5 | Dinas Pertanahan Kabupaten Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaen Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan mediasi | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian masalah |
| 6 | BPN Kabupaten Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia Informasi - Badan yang berwenang menerbitkan status hak lahan | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu di dalam penyelesaian permasalahan |
| 7 | Muspika Kecamatan Sumbermanjing wetan | <ul style="list-style-type: none"> - Kepanjangan dari pemerindah daerah kabupaten Malang - Menjaga ketertiban, | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Mediasi - Pengamanan diwilayah konflik | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|
| | | keamanan di wilayahnya | | |
| 8 | Pemerintah Desa Tegalrejo | - Sebagai wakil masyarakat dan wakil Pemerintah | - Menjembatani masyarakat dengan PTPN | - Menciptakan kesejahteraan masyarakat |
| 9 | LBH Surabaya | - Lembaga Independen | - Memberikan pendidikan hukum dan pendampingan kepada masyarakat | - Kesetaraan pengetahuan hukum antara masyarakat dengan PTPN |

Sumber:

Diolah oleh penulis pada tahun 2018



Melalui tabel diatas, pemetaan aktor yang terlibat didalam manajemen konflik perkebunan Pancursari dapat dilihat dengan jelas. Melalui tabel diatas kemudian memperjelas kewenangan setiap aktor, strategi yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai semua aktor. Dengan begitu mempermudah kita didalam melihat peran serta setiap aktor dan solusi yang digunakan.

5.1.1 PTPN XII Kebun Pancursari

PTPN XII adalah salah satu perusahaan milik Negara yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian yang mempunyai lokasi kerja di Jawa Timur. PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII). PTPN XII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang peleburan PT Perkebunan Nusantara XXIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XXVI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara XXIX (Persero) yang dituangkan dalam Akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 1996.⁶²

Kebun Pancursari merupakan perkebunan yang masuk wilayah kerja PTPN XII. Perkebunan ini terletak di wilayah Kabupaten Malang, Tepatnya di Desa Ringin Kembar kecamatan Sumberanjing wetan. Didalam permasalahan ini, Kebun Pancursari merupakan pemilik lahan perkebunan. Mereka mempunyai kewenangan didalam mengelola lahan yang dimilikinya serta berhak memberika kewenangan kepada masyarakat sekitar untuk ikut mengarap lahan dengan persetujuan kerjasama usaha. Dengan luas perkebunan kebun Pancursari se-luas 3.031,0740 hektar membuat pihak PTPN memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan. Masyarakat sekitar

⁶² <http://www.ptpn12.com/index.php/tentang-kami/profil>. Diakses hari selasa, 18 Septmber 2017, Pukul 15.40 WIB.

perkebunan diberdayakan melalui perekrutan sebagai tenaga kerja ataupun perjanjian kerjasama pengelolaan lahan.

Dalam pengelolaan kawasan perkebunan, PTPN XII menganut kerjasama usaha (KSU) yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: 13/MBU/09/2014. Peraturan ini menjadi pedoman untuk berkerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan dalam hal pengelolaan lahan perkebunan. Kebun Pancursari memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan dengan perjanjian kerjasama usaha.

Peran serta dari pihak Pancursari ini adalah sebagai penyedia lahan perkebunan yang di KSU kan dengan pihak masyarakat Desa Tegalrejo. Selain penyedia lahan, dalam proses penyelesaian permasalahan pihak Pancursari mengambil jalur hukum agar penerapan KSU sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

5.1.2 Masyarakat Penyewa Lahan

Dengan kebutuhan tanah yang meningkat setiap tahunnya, masyarakat Desa Tegalrejo melakukan pengajuan kerjasama usaha kepada PTPN XII Kebun Pancursari berupa sewa lahan garapan.oleh pihak Kebun dan disetujui dan dikoordinayori oleh Ari Ismanto selaku kepala Desa Tegalrejo. Kerjasama usaha ini berjalan mulai tahun 2014 masyarakat Desa resmi menggarap lahan melalui perjanjian kerjasama usaha. Kerjasama usaha ini berdurasi satu tahun, dan dapat diperpanjang kembali tahun berikutnya. Setelah berjalan, KSU menimbulkan permasalahan dan terjadilah konflik Kebun Pancursari.

Permasalahan ini bermula dari ketidakpuasan masyarakat dari hasil kebun selama satu tahun.

Peran serta masyarakat Desa Tegalrejo dalam permasalahan ini adalah sebagai pihak penyewa/penggarap lahan sekaligus mitra KSU kebun Pancursari. Kegiatan itu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pengajuan penyewaan lahan.

5.1.3 Kepolisian Republik Indonesia Polres Malang

Didalam proses manajemen konflik antara PTPN XII Kebun Pancursari dengan asyarakat Desa Tegalrejo, Polres Malang hadir didalamnya. Polres Malang adalah penegak hukum diwilayah Kabupaten Malang itu sendiri. Apabila ada sebuah permasalahan yang menimbulkan gesekan di masyarakat, maka polres Malang hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Didalam permasalahan konflik perkebunan Pancursari ini, Polres Malang selaku penegak hukum mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum dimasyarakat. Selain itu, polres Malang juga mempunyai kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman terhadap masyarakat yang bergesekan tersebut.

Sebagai pihak ketiga didalam permasalahan ini, Polres Malang dalam menjalankan tugasnya harus adil dan benar dimata hukum. Selain itu, kehadirannya harus bisa menjadi pihak yang netral tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dengan begitu apa yang dilakukan oleh polres Malang tidak akan merugikan salah satu pihak. Selaku pihak ketiga, Polres Malang hadir dalam konflik ini sebagai mediator antara dua belah pihak yang berkonflik.

Diharapkan dengan mediasi ini, suasana keamanan, ketertiban di masyarakat dapat terjaga dengan baik.

5.1.4 DPRD Kabupaten Malang

Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang bagian Hukum dan Pemerintahan turut serta didalam penyelesaian konflik kebun Pancursari. Mereka turut andil didalam proses penyelesaian dan memediasi kedua belah pihak bersitegang. Tugas DPRD disini selaku wakil rakyat, mereka juga bagian dari pemerintah itu sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh DPRD Kab. Malang, antara lain melakukan *hearing* dengan masyarakat, memediasi antara masyarakat dengan pihak Kebun Pancursari serta memanggil BPN Kabupaten Malang sebagai tim ahli dalam permasalahan ini.

5.1.5 Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

Dinas Pertanahan mempunyai peranan penting didalam penyelesaian permasalahan kasus di Kabupaten Malang. Mereka mempunyai suatu struktur organisasi yang didalamnya mempunyai kewenangan didalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam kasus ini, yang menjadi obyek permasalahan adalah tanah Negara dengan masyarakat desa, hal ini membuat peran dinas Pertanahan sangatlah penting. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang terlibat didalam konflik serta memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

5.1.6 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang

Badan Pertanahan Nasional atau biasanya disebut BPN adalah lembaga pemerintah yang bertugas atau mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat tanah maupun kepemilikan atas tanah. Didalam permasalahan kebun Pancursari ini, selain sebagai penerbit HGU Kebun Pancursari, dalam konflik ini mereka bertugas sebagai penyedia data. Maksud dari penyedia data adalah didalam setiap pertemuan maupun mediasi, BPN selalu dijadikan sebagai tenaga ahli dibidang pertanahan. Data yang dicantumkan berdasarkan data yang sudah ada didalam pembukuan tanah kabupaten Malang.

5.1.7 Muspika Kecamatan Sumbermanjingwetan

Muspika kecamatan Sumbermanjingwetan ini terdiri dari camat Sumbermanjingwetan, Polsek Sumbermanjingwetan serta Koramil Sumbermanjingwetan itu sendiri. Pemerintah Sumbermanjingwetan didalam melihat kasus ini bertugas sebagai fasilitator pertemuan kedua belah pihak. Selain itu mereka juga berusaha menjaga keamanan, ketertiban dimasyarakat itu sendiri. Muspika Sumbermanjingwetan didalam meredakan permasalahan kebun Pancursari menggunakan asas musyawarah mufakat. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya pihak dari Muspika mempertemukan kedua belah pihak. Selain itu, Muspika juga sebagai mediator dalam pertemuan pertemuan tersebut, agar suasana kondusif kembali tercipta di antara kedua belah pihak.

5.1.8 Pemerintah Desa Tegalrejo

Meskipun masyarakatnya sedang menghadapi permasalahan, Pemerintah Desa Tegalrejo berupaya bersikap netral. Hal ini dibuktikan dengan perannya sebagai penjemabatan antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Pemerintah Desa sendiri juga berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan jalan damai dengan melakukan pertemuan pertemuan dan melakukan mediasi. Selain itu, pemerintah Desa juga berkoordinasi dengan jajaran di atasnya seperti Muspika Kecamatan Sumbermanjingwetan serta Pemerintah daerah Kabupaten Malang didalam melihat permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk persamaan persepsi dalam melihat kasus ini dan percepatan penyelesaiannya.

5.1.9 LBH Surabaya

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya adalah salah satu pihak ketiga didalam permasalahan Konflik Pancursari ini. Kehadirannya didalam permasalahan ini adalah sebagai pendamping masyarakat untuk meghadapi hukum yang dilakukan oleh PTPN. YLBH-LBH Surabaya memberikan pendampingan terhadap masyarakat agar ada keadilan di mata hukum. Dengan begitu rasa keadilan bagi setiap warga Negara dimata hukum sama.

Selain melakukan pendampingan terhadap masyarakat, LBH Surabaya juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Hal ini dilakukan oleh LBH Surabaya karena ada laporan oleh warga mengenai adanya tindakan diluar batas yang dilakukan oleh Brimob. Selanjutnya LBH Surabaya mengirim surat kepada kepolisian daerah Jawa Timur mendesak

agar tidak ada tindakan berlebihan terhadap masyarakat sehingga semua sama dimata hukum.

5.2 Manajemen Konflik Perkebunan Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo

Menurut Marc Howard Ross, didalam memanajemen konflik terdapat lima aspek yang harus diperhatikan. Lima aspek tersebut digunakan untuk menguraikan permasalahan yang ada, sehingga memudahkan didalam penyelesaian suatu masalah. Berikut adalah beberapa aspek yang telah digunakan dalam melihat permasalahan KSU Kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang.

5.2.1 Identifikasi Masalah

Adanya permasalahan konflik antara PTPN XII Kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo membuat publik bertanya-tanya. Hal ini dikarenakan permasalahan ini berawal dari Kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Bagaimana bisa itu terjadi, padahal sudah ada kesepakatan bersama. Namun setelah dilakukan penelitian oleh penulis dan pengumpulan informasi-informasi dari narasumber yang ada, dapat sedikit gambaran mengenai motif penyebab timbulnya Konflik.

Dari hasil penelitian yang didapat, ada beberapa kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah aktor yang terlibat konflik. Salah satu kepentingan yang pertama adalah kepentingan dari pihak PTPN dalam menjalankan usahanya. Kepentingan ini adalah kepentingan dalam menjalankan KSU yang telah diatur dalam peraturan Menteri BUMN Nomor 13/MBU/09/2014. Peraturan

ini mengatur bahwa PTPN boleh menyewakan lahannya untuk masyarakat sekitar yang ingin mengolah lahan Negara tersebut. Dengan adanya payung hukum tersebut, Kebun Pancursari memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk bekerja sama dalam mengolah lahan kebun Pancursari.

Selain itu, PTPN juga mempunyai kepentingan dengan menjaga keberlangsungan usahanya di daerah tersebut. Kepentingan itu berupa penguasaan lahan perkebunan serta menjalankan roda bisnis mereka. Maka dari itu, pihak perkebunan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Tegalrejo dalam keterlibatan pengelolaan lahan. Keterlibatan tersebut dengan cara pemberian kerjasama usaha dengan sistem sewa lahan. Dengan begitu, masyarakat juga ikut menjaga dan melestariakan perkebunan tersebut. Selain itu pihak perkebunan juga menyiapkan lapangan pekerjaan untuk Masyarakat Desa Tegalrejo sebagai buruh harian atau pegawai tetap. Seperti yang dikatakan oleh Hendro selaku manajer Kebun Pancursari, *"...Kami siap menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, kalau mereka ingin mendapatkan pekerjaan tetap, bisa ikut menjadi penyadap karet. Penyadap karet itu tidak ada liburnya. Setiap hari selalu bekerja"*⁶³.

Disisi lain, terdapat kepentingan dari masyarakat Desa Tegalrejo untuk menguasai lahan perkebunan tersebut. Kepentingan ini dilakukan bukan karena alasan, mereka membutuhkan lahan garapan untuk menyambung hidup dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kabar tentang KSU dengan sistem

⁶³Wawancara dengan hendro, *Op.cit*

sewa lahan, masyarakat berbondong-bondong ingin menggarap lahan tersebut. Tapi pada awal tahun 2015, permasalahan muncul dikarenakan karena ketidaksesuaian pembayaran KSU yang telah disepakati. Masyarakat menganggap bahwa pembiayaan pada tahun pertama masih mengalami kerugian sehingga mereka meminta waktu dalam pembayaran. Hal itupun diiyakan oleh pihak kebun. Namun masyarakat malah menjadi, ditahun berikutnya dengan alasan bahwa tanah itu merupakan tanah nenek moyang mereka dan mereka melanggar KSU. Hal inilah yang membuat PTPN mengambil jalur hukum terhadap masyarakat Desa Tegalrejo dengan tuduhan penyerobotan Lahan.

Masyarakat desa Tegalrejo yang di Koordinator oleh Ari Ismanto selaku Koordinator penyewa lahan memiliki ambisi untuk menguasai lahan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dengan dilanggarnya perjanjian kerjasama usaha yang telah disepakati. Dengan begitu, bukan salah lagi pihak perkebunan mengambil jalur Hukum dalam penyelesaian permasalahan ini.

5.2.2 Penilaian Masalah

Penilaian masalah merupakan sudut pandang ataupun kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam Konflik KSU Pancursari. Meskipun pada awalnya kedua kepentingan merupakan kepentingan yang baik dan bersifat adil, namun pada akhirnya terjadi penyimpangan. Dapat dilihat pada sub bab diatas bahwasanya kepentingan yang pada awalnya bersifat baik dengan pemberian KSU serta melakukan usaha untuk kesejahteraan namun pada akhirnya dilanggar oleh salah satu pihak.

Memang pada awalnya semua kepentingan pada kedua aktor adalah kepentingan yang baik dan adil. Keinginan untuk menjalin kerjasama juga merupakan bentuk sinergitas yang baik bagi keduanya. Dengan alasan yang baik pula masyarakat memberikan keyakinan pada pihak perkebunan dengan dalih untuk kesejahteraan, maka disetujuiilah KSU tersebut. Namun pada akhirnya permasalahan muncul dan jalur hukumlah satu satunya cara untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Memang dilihat dari kacamata hukum, permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan apabila penegakkan KSU tersebut dapat dilaksanakan. Karena didalam KSU tersebut terdapat poin-poin kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan bersama, maka pembatalan kerjasama tersebut dapat dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, menurut Sunardi selaku Kabag Ops Polres Malang mengatakan, ⁶⁴

“...karena saya polisi, kacamata saya adalah hasil penyidikan, menurut saya karena polisi sudah berani mengajukan berkas perkara ini dan sampai sekarang disidangkan maka pihak kepala desa ini ada pelanggaran hukum. 1 dia tidak membayar sesuai dengan kewajibannya dalam perjanjian, 2. Sudah dikompromikan, sudah disepakati ada notaris pun juga tidak ditepati...”

Dari argument diatas, jelas bahwasanya pelanggaran hukum telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalrejo. Mereka melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama dan merekapun melanggar hasil mediasi yang telah dilakukan dituangkan dalam akta notaris.

⁶⁴Wawancara dengan Sunardi Selaku Kabag Ops Polres Malang di Polres Malang, pada tanggal 27 juli 2018. Pukul 08.50 WIB.

5.2.3 Masuknya Pihak ketiga dalam Manajemen Konflik Kebun Pancursari

Seringkali dalam upaya penyelesaiannya, pihak yang terkait dengan konflik membutuhkan campur tangan pihak ketiga dalam prosesnya. Pihak ketiga ini berperan sebagai mediator untuk memberikan wadah dalam mempertemukan kedua pihak yang terlibat permasalahan. Hal ini tentu saja dengan persetujuan kedua belah pihak. Kadangkala pihak ketiga ini berperan untuk menterjemahkan keluhan permasalahan yang ada, membuat saran dan solusi yang setidaknya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.⁶⁵ Akan tetapi, kewenangan pihak ketiga hanya sampai pada disitu saja, selebihnya kekuasaan untuk menerima atau menolak solusi berada ditangan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Didalam permasalahan KSU Pancursari, pihak ketiga datang dan menjalin komunikasi pada kedua belah pihak. Kehadiran pihak ketiga disini sebagai pihak yang netral. Mereka hadir untuk mendengarkan keluhan, dan mereka hadir untuk memberikan solusi. Pihak ketiga yang berperan aktif didalam proses penyelesaian KSU Pancursari antara lain adalah,

1. Komisi satu DPRD Kabupaten Malang
2. Bagian Operasional Polres Malang
3. BPN Kabupaten Malang
4. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
5. MUSPIKA Kecamatan Sumbermanjngwetan
6. Pemerintah Desa Tegalrejo
7. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

⁶⁵H.A Rusdinana, *Manajemen konflik. Op.cit*

Pihak-pihak diatas mempunyai peran dalam upaya penyelesaian permasalahan Pancursari. Peran penting dari pihak pihak ada yang saling bersinergi dalam prosesnya. Salah satunya adalah hubungan kinerja dari DPRD, Dinas Pertanahan, dan BPN Kab. Malang. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala bidang permasalahan, konflik dan sengketa BPN Kab. Malang ibu Heny Sulstyowati, Beliau mengungkapkan bahwa⁶⁶,

“dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, phak BPN sendiri sering dipanggil oleh DPRD untuk dimintai informasi. Disini kita sebagai tim ahli bersama Dinas Pertanahan. Kita dimintai pendapat oleh DPRD bagaimana tentang kasus ini dan bagaimana penanganannya. Tugas kita sebagai penyedia data yang dibutuhkan oleh mereka dan proses penyelesaian permasalahan ini”

Dari argumen diatas, dapat dilihat tentang bagaimana hubungan kinerja antar aktor dalam suatu permasalahan. Saling ketergantungan antar aktor ini membuat proses penyelesaian kebun Pancursari semakin cepat. Hal ini dikarenakan dengan adanya komunikasi antar aktor yang berperan dalam manajemen konflik akan memudahkan pengambilan keputusan. Dengan salingnya berkomunikasi antar lembaga yang berperan, maka keputusan-keputusan yang diambil tepat sasaran. Selain itu tidak adanya kesalah pahaman antar pihak yang terlibat dalam proses penyelesaiannya.

Selain kerjasama antar aktor yang terlibat, manajemen konflik Pancursari juga terjadi hubungan pengawasan antar aktor. Pengawasan ini sebagai bentuk keseimbangan agar tidak ada kewenangan aktor yang melampaui batas kewenangannya. Salah satu aktor yang terlibat dalam pengawasan ini adalah

⁶⁶Wawancara dengan Heny Sulistyowati selaku Kepala bidang permasalahan, konflik dan sengketa BPN Kab. Malang di kantor BPN Kab. Malang, pada tanggal 30 juli 2018. Pukul 11.00 WIB

LBH Surabaya. Lembaga *independen* bantuan hukum ini meskipun tidak terjun langsung ke lapangan dalam proses penyelesaian permasalahan, mereka juga mengikuti permasalahan ini. Pengawasan ini dilakukan oleh LBH Surabaya ini dilakukan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Brimob. Pengawasan ini dilakukan karena ada laporan dari warga ada tindakan menakut-nakuti yang dilakukan oleh brimob.

Langkah yang diambil oleh LBH Surabaya terhadap tindakan brimob tersebut adalah dengan melakukan konfirmasi pers. Seperti yang dilakukan oleh kepala bidang penanganan kasus LBH Surabaya yaitu Hosna. Berdasarkan pantauan YLBHI-LBH Surabaya, situasi terakhir yang terjadi di Malang Selatan, khususnya Desa Tegal Rejo, Sumbermanjingwetan, semakin memanas. Salah satunya dipicu oleh adanya surat pemberitahuan dari pihak PTPN XII Pancursari nomor: PSR/XI/275/2017⁶⁷. Salah satu poinnya adalah akan melakukan aksi pencabutan paksa tanaman penduduk. Selain pernyataan hosna, Sahura kepala bidang penanganan kasus seksi pertanahan dan ekosistem berpendapat bahwa⁶⁸,

“Surat dari pihak PTPN XII Pancursari ini merupakan salah satu bentuk teror terhadap warga yang dapat memicu adanya kekerasan yang harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian, bukan memfasilitasi pelaksanaannya dengan mengerahkan anggota kepolisian, entah satuan Brimob atau satuan lainnya, dengan dalih melakukan pengamanan”

⁶⁷ <http://www.indeksberita.com/lbh-sikapi-konflik-agraria-malang-meminta-polisi-lindungi-warga/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2018. Pukul 10.21 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Sahura selaku Kepala bidang penanganan kasus seksi Pertanahan dan Ekosistem YLBHI-LBH Surabaya di kantor LBH Surabaya, pada tanggal 31 Juli 2018. Pukul 10.45 WIB.

Dari argument diatas dapat dilihat peran serta LBH Surabaya dalam proses penyelesaian kebun Pancursari. Meskipun tidak terlibat langsung dilapangan, mereka mempunyai andil penting dalam hal pengawasan lembaga lain. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak perkebunan ataupun masyarakat karena adanya kesetaraan dimata hukum.

Selain itu, pihak LBH Surabaya melakukan desakan terhadap Polda Jawa Timur, seperti yang dilansir dalam media online, mereka mengajukan beberapa desakan agar tidak ada kesewenang-wenangan pihak kepolisian dalam mengintimidasi warga. Untuk itu, YLBHI-LBH Surabaya, mengirimkan surat desakan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor: 287/SK/LBH/VIII/2017, tertanggal 25 Agustus 2017, yang pada intinya mendesak agar:⁶⁹

1. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur agar tidak memfasilitasi aksi pencabutan paksa tanaman oleh PTPN XII Pancursari dengan dalih apapun. Bahkan, kepolisian secara tegas harus melarang aksi tersebut untuk menghindari adanya konflik horizontal
2. Mendesak agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur memberikan perlindungan kepada warga masyarakat petani dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis

⁶⁹ <http://www.indeksberita.com/lbh-sikapi-konflik-agraria-malang-meminta-polisi-lindungi-warga/>. *Op.cit*

5.2.4 Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif ini pada dasarnya dilakukan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik merasa dirugikan. Sehingga, tujuan dari komunikasi efektif ini adalah untuk menemukan keputusan penyelesaian konflik yang sesuai, dimana mungkin atau tidak mungkin menguntungkan kedua belah pihak.⁷⁰ Komunikasi efektif ini dapat berupa pertukaran informasi antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagai upaya untuk menghasilkan *win-win solution*. Meskipun didalam identifikasi masalah sudah jelas bahwasanya masyarakat penyewa lahan telah melanggar perjanjian kerjasama, namun pihak ketiga disini berupaya mencari solusi yang terbaik karena mereka berhadapan dengan masyarakat yang banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Sunardi Riyono Kabag Ops Polres Malang⁷¹,

“Pancursari potensi konfliknya tinggi, karena disitu kita berhadapan dengan masyarakat, yang satu sisi ptpn ini adalah perusahaan Negara maka juga dilaksanakan pengamanan oleh aparat Negara. Sehingga disana dijaga oleh brimob dalam rangka menjaga aset Negara. Kalau tidak segera ditangani maka akan terjadi konflik, konflik bisa saja anantara masyarakat dengan pemerintah, bisa saja aparat dengan pihak keamanan. Kita selalu jemput bola, ketika ada potensi kerawanan ini maka kita selalu mengundang masyarakat ataupun pihak kebun untuk berdialog, kita patroli kesana, memberikan pembinaan dan pengarahan, kita ceramah dimasjid...”

Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini bukan tanpa alasan, meskipun mereka tahu permasalahan ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas diwilayah tersebut meskipun menurut penulis hal ini merupakan bentuk ketidaktegasan dalam mengatasi permasalahan ini. Seharusnya pihak

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Wawancara dengan Sunardi Riyono, *op.cit*

ketiga yang hadir bertindak tegas dalam proses penyelesaian permasalahan ini sehingga tidak semakin berlarut-larut.

Komunikasi sering terjadi antara kedua belah pihak yang bertikai, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kepolisian, maupun kedua belah pihak yang saling bertemu. Pertemuan-pertemuan banyak dilakukan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang ada. Baik dari pihak Perkebunan dan masyarakat sendiri saling memberikan informasi dan penjelasan menurut pandangan mereka. Hal ini sangat positif untuk dilakukan agar tidak terjadi putus komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala bagian operasional Polres Malang,⁷²

“Kita undang cooffe morning, kita mengelola potensikonflik, kita ceramah dimasjid sana, saya kumpulkan di polres sini kayak yang tadi, juga di kecamatan, kita patrol disana, kita pembinaan masyarakat disana”.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Polres Malang dari pernyataan diatas diharapkan dapat terjadi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

5.2.4.1 Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pemerintah

Salah satu tindakan yang sering digunakan dalam berkomunikasi efektif adalah mediasi. Kegiatan ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam penyelesaian permasalahan KSU kebun Pancursari. Dengan dilakukannya mediasi tersebut diharapkan adanya solusi terbaik untuk jalan

⁷² Wawancara dengan Sunardi Riyono,*op.cit*

keluar permasalahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Drs. Didik Gatot Subroto⁷³,

“...Kita mengundang para pihak yang terlibat, kita kumpulkan, tokoh tokoh masyarakat kita cek bagaimana posisi kedua belah pihak... Tugas kita hanya memediasi kedua belah pihak agar ada solusi yang terbaik bagi keduanya, Kita disini hanya sebagai mediator, jadi kita berusaha memposisikan diri kita ditengah tengah. Namun, kita juga melihatnya secara hukum, apabila masyarakat benar benar mempunyai hak atas pancursarimaka gugat secara hukum dipegadilan agar kejadian ini tidak masuk kedalam kriminalisasi yaitu peyerobotan”

Berangkat dari pernyataan diatas, peran Pemerintah sendiri ikut berperan aktif dalam upaya penyelesaian permasalahan ini. Hal ini juga tentu sebuah peran yang baik, namun hal ini seharusnya dibarengi dengan tindakan nyata dan menyentuh ke akar permasalahan.

Dengan berlarut-larutnya permasalahan ini menunjukkan ketidakseriusan dari pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Terbukti dari awal muncul permasalahan ini pada tahun 2015 sampai awal 2018 belum juga menemui titik terang. Manajer kebun pancursari mengungkapkan, *“Saya disinikan korban yaa, melihat dari tahun 2015, 2016, 17, 18 belum selesai nih, masnya pasti tau jawabannya ya”*⁷⁴.

Dengan kekecewaan pihak kebun terhadap permasalahan yang belum kunjung selesai, namun disisi lain meraka masih berupaya untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan agar terjadi percepatan

⁷³Wawancara dengan Didik Gatoto Subroto selaku ketua komisi A DPRD Kab. Malang di kantor DPRD Kab. Malang, pada tanggal 15 Mei 2018. Pukul 14.15 WIB.

⁷⁴Wawancara dengan Hendro, *op.cit*

penyelesaian masalah sehingga lahan mereka juga segera kembali dan digunakan lagi untuk kepentingan perkebunan.

Gambar 5.2.4.1
Mediasi di Kecamatan Sumbermanjingwetan



*Sumber
Dokumentasi Humas Polres Malang*

Mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan awal tahun 2018 di mediasi oleh Bagian Operasional Polres Malang. Kegiatan ini dihadiri oleh⁷⁵,

1. Kepala Bagian Operasional Polres Malang
2. Camat Sumbermanjingwetan
3. Kapolsek Sumbermanjingwetan
4. Koramil Sumbermanjingwetan
5. Manajer Kebun Pancursari
6. Wakil Manajer Kebun Pancursari
7. Sekretaris Desa Tegalrejo
8. Perwakilan masyarakat penyewa lahan

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui asal mula akar permasalahan.

Selain itu, kegiatan mediasi tersebut yang menghadirkan kedua belah pihak diharapkan dapat saling bersilaturahmi dan tidak putus komunikasi karena

⁷⁵Hasil pemaparan Humas Polres Malang kepada Penulis

permasalahan tersebut. Sehingga dengan begitu tugas dari kepolisian yang menjaga keamanan, ketertiban dimasyarakat dapat dilaksanakan.

Selain pihak DPRD, Pihak kepolisian Polres Malang juga sering melakukan mediasi untuk menjaga keamanan, ketertiban di masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kela bagian Operasional Polres Malang Sunardi Riyono,S.H dalam pemaparannya kepada penelti beliau mengungkapkan⁷⁶,

“Kalau tidak dimediasi, ini akan meruncing permasalahannya, yang si A tidak pernah bertemu mencurigai B. dan B mencurigai A, suatu saat akan terjadi gesekan yang besar karena putus komunikasi. Tetapi kalau mereka ini kita kumpulkan, polisi berada di tengah kita jadi mengerti apa akar permasalahannya”

Berdasarkan argument diatas, komunikasi sangatlah penting untuk kedua belah pihak. Dengan adanya saling berkomunikasi antara kedua belah pihak, maka dapat meminimalisir adanya konflik fisik antara kedua belah kubu. Dengan begitu suasana kondusif dapat terlasana diantara kedua belah pihak.

5.2.4.2 Hearing, Komunikasi efektif yang dilakukan oleh Pemerintah

Selain dari mediasi di atas, upaya demi mencapai penyelesaian permasalahan konflik Perkebunan yaitu melalui *hearing* kepada Pihak DPRD Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Sumbermanjing hingga Polres Malang. *Hearing* sendiri merupakan suatu konsep pemecahan suatu masalah melalui pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. *Hearing* sendiri di dalamnya memiliki batas tugas dan

⁷⁶Wawancara dengan Sunardi Riyono, *op.cit*

kewenangannya yang berisikan (anggota masyarakat, lembaga atau badan pemerintah, dan sebagainya).⁷⁷

Hearing yang dilakukan di fasilitator oleh Pihak DPRD Kabupaten Malang terutama Komisi satu sebagai pemerintah sekaligus wakil rakyat. Awal mula terjadinya *hearing* dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dari pihak pemerintah dengan adanya permasalahan konflik yang melibatkan masyarakat yaitu penyewa lahan dengan pihak perkebunan. Dalam *hearing* yang dilakukan oleh pihak DPRD, mereka memanggil pihak BPN Kabupaten Malang untuk dimintai keterangan sebagai tim ahli serta pihak Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Mereka dipanggil untuk melihat bagaimana legalitas permasalahan ini.

Gambar 5.2.4.2

Hearing dari Pihak kecamatan Sumbermancing wetan dengan masyarakat pengolah lahan di kantor desa Tegalrejo



Sumber

Dokumentasi Humas Kecamatan Sumbermanjingwetan

Selain *Hearing* yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang, Polres Malang juga melakukan *hearing*. Jejak pendapat dilakukan oleh Polres Malang dengan

⁷⁷<http://kbbi.web.id/dengar>, di akses hari Sabtu, 11 Oktober 2018. Pukul 06.53

berbagai cara, mulai dengan acara *cooffe morning*, Patroli ke perkebunan degan mengajak masyarakat berdialog serta pemanggilan pihak perkebunan ke Polres Malang. Polres Malang yang diwakili oleh bagian operasional mempunyai tugas untuk menjaga kamtibmas di masyarakat. Seperti pemaparan Sunardi, Kepala Bagian Operasional Polres Malang,⁷⁸

“Tugas pokok polri yang tercantum pada pasal 13 uu no 2 tahun 2002 itu ada 3, yang pertama pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua polri sebagai penegak hukum dan yang yang ketiga adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berangkat dari situ, dengan adanya kasus pancursari maka saya juga harus hadir dalam memelihara, melindungi mengayomi masyarakat”

Dari argumen diatas dapat dilihat bagaimana peran serta polres Malang dalam upaya penyelesaian permasalahan kebun Pancursari. Dengan tugas kepolisian yang melindungi ataupun menjaga situasi dimasyarakat, terutama di Desa Tegltrejo yang mengalami konflik dengan pihak perkebunan Polres alang hadir untuk menjaga agar tidak terjadi gesekan fisik.

Selain melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan untuk meminimalisir konflik, Polres Malang juga memanggil pihak Pancursari untuk dimintai keterangannya. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang terjadi. Pemanggilan pihak Pancursari ini dilakukan pada tanggal 27 juli 2018 bertempat di ruang rapat Bag Ops. Pihak Pancursari dalah hal ini memaparkan luas lahan mereka menurut HGU Kebun Pancursari tahun 2015.

Selain itu mereka juga menjelaskan tindakan tindakan warga yang telah melanggar hukum seperti mengingkari perjanjian kerjasama. Dalam *hearing* ini,

⁷⁸Wawancara dengan Sunardi Riyono, *Op. cit*

kepolisian sebagai pihak netral juga tidak begitu langsung percaya, mereka juga menunggu penjelasan dari pihak masyarakat desa Tegalrejo sebagai penyewa lahan kebun. Pihak kepolisian melakukan patrol serta melakukan hearing di kantor Desa Tegalrejo.

5.2.5 Kesepakatan Bersama

Setelah adanya berbagai pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bermasalah, terjadi beberapa kesepakatan diantara keduanya. Hal ini sangat positif untuk menjaga kestabilan situasi dan kondisi dilapangan. Kesepakatan-kesepakatan ini diambil untuk menguraikan permasalahan-pemmasalahan yang ada diantara kedua belah pihak.

Selain itu, kesepakatan-kesepakatan juga diprakarsai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konflik Pancursari. Didalam mediasi-mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga juga menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan. Seperti mediasi yang dilakukan oleh pihak Muspika Kecamatan Sumbermanjing, dari proses mediasi yang dilakukan oleh Muspika disepakati untuk tidak terjadinya konflik fisik sampai ada keputusan dari pemerintah daerah Kabupaten Malang. Sampai saat ini Alhamdulillah situasi dapat terjaga untuk tidak adanya gesekan fisik.

Untuk kesepakatan juga pernah terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak kebun dengan masyarakat penyewa lahan. Dalam mediasi yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 di Polres Malang dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Mediasi ini di mediasi oleh kepala bagian operasional Polres Malang. Dalam kesepakatan tersebut juga dituangkan

dalam akta notaris agar mempunyai kekuatan hukum. Menurut pihak Polres sendiri, kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris tersebut dilakukan karena pernah terjadi kesepakatan sebelumnya namun tidak dilanjutkan. Sehingga dengan adanya notaris diharapkan dapat dilaksanakan kesepakatan yang akan diambil. Menurut Hendro manajer Kebun Pancursari, isi kesepakatan itu adalah⁷⁹,

“Banyak kesepakatan awalnya, antara lain masyarakat tidak boleh mendekati wilayah yang menjadi sengketa tetapi semua dituangkan dalam akta perjanjian notaris itu mereka mau mengembalikan kerugian kebun mengembalikan lahan...”

Dari Argumen diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang diambil dan dituangkan dalam akta notaris pihak penyewa menyanggupinya. Namun dalam kenyataan yang terjadi sampai sekarang, pihak masyarakat masih menggarap lahan KSU tersebut. Meskipun masyarakat sudah membayarsewa lahan tersebut namun secara mencicil. Hal ini juga diungkapkan oleh pemerintah Desa Tegalrejo yaitu Nanang. Nanang mengungkapkan bahwa pembayaran telah dilakukan namun belum mencangkup semua dengan alasan bahwa hasil panen dan biaya transport yang mahal.

Dengan tidak dilaksanakan hasil kesepakatan tersebut, maka pihak perkebunan menempuh jalur hukum. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang diambil bersama itu sudah mempunyai kekuatan hukum karena sudah tertuang dalam akta notaris. Sehingga samapai sekarang proses hukum masih berlanjut untuk terdakwa bahkan tersangka yaitu koordinator penyewa lahan Ari Ismanto.

⁷⁹Wawancara dengan Hendro, *Op.cit*

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir ini dilakukan penarikan kesimpulan yang dimasukkan ke dalam sub bab dan beberapa uraian didalamnya. Telah dilakukan pembagian ke dalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari pemaparan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

6.1 Kesimpulan

Keseluruhan pembahasan yang telah dijabarkan, sesuai dengan rumusan masalah dan beberapa temuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, keberadaan pihak pihak ketiga yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan konflik ini sangatlah dirasakan kehadirannya. Dengan adanya pihak tersebut, munculah solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuai tupoksi dan kewenangan pihak yang hadir. Pihak pihak tersebut diantaranya BPN Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Sumbermanjingwetan, Pemerintah Desa Tegalrejo, Polres Malang serta YLBH-LBH Surabaya. Mereka berkerja sesuai kewenangannya masing-masing dalam upaya penyelesaian permasalahan kebun Pancursari tersebut.

Kedua, Identifikasi masalah digunakan untuk melihat bagaimana awal mula terjadi atau munculnya permasalahan. Dari hasil penelitian yang didapat, ada beberapa kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah actor yang terlibat konflik. Salah satu kepentingan yang pertama adalah kepentingan dari pihak PTPN dalam

menjalankan usahanya. Kepentingan ini adalah kepentingan dalam menjalankan KSU yang telah diatur dalam peraturan Menteri BUMN Nomor 13/MBU/09/2014. Peraturan ini mengatur bahwa PTPN boleh menyewakan lahannya untuk masyarakat sekitar yang ingin mengolah lahan Negara tersebut. Disisi lain, terdapat kepentingan dari masyarakat Desa Tegalrejo untuk menguasai lahan perkebunan tersebut. Kepentingan ini dilakukan bukan karena alasan, mereka membutuhkan lahan garapan untuk menyambung hidup mereka.

Ketiga, Penilaian masalah merupakan sudut pandang ataupun kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam Konflik KSU Pancursari. Meskipun pada awalnya kedua kepentingan merupakan kepentingan yang baik dan bersifat adil, namun pada akhirnya terjadi penyimpangan. Memang pada awalnya semua kepentingan pada kedua aktor adalah kepentingan yang baik dan adil. Keinginan untuk menjalin kerjasama juga merupakan bentuk sinergitas yang baik bagi keduanya. Dengan alasan yang baik pula masyarakat memberikan keyakinan pada pihak perkebunan dengan dalih untuk kesejahteraan, maka disetujuiilah KSU tersebut. Namun pada akhirnya permasalahan muncul dan jalur hukumlah satu satunya cara untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Memang dilihat dari kacamata hukum, permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan apabila penegakkan KSU tersebut dapat dilaksanakan. Karena didalam KSU tersebut terdapat poin poin kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan bersama, maka pembatalan kerjasama tersebut dapat dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian.

Keempat, Didalam permasalahan KSU Pancursari, pihak ketiga datang dan menjalin komunikasi pada kedua belah pihak. Kehadiran pihak ketiga disini sebagai pihak yang netral. Mereka hadir untuk mendengarkan keluhan, dan mereka hadir untuk memberikan solusi. Pihak ketiga yang berperan aktif didalam proses penyelesaian KSU Pancursari antara lain adalah,

1. Komisi satu DPRD Kabupaten Malang
2. Bagian Operasional Polres Malang
3. BPN Kabupaten Malang
4. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
5. MUSPIKA Kecamatan Sumbermanjingwetan
6. Pemerinah Desa Tegalrejo
7. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Pihak-pihak diatas mempunyai peran dalam upaya penyelesaian permasalahan Pancursari. Peran penting dari pihak-pihak ada yang saling bersinergi dalam prosesnya. Salah satunya adalah hubungan kinerja dari DPRD, Dinas Pertanahan, dan BPN Kab. Malang.

Kelima, Komunikasi efektif ini pada dasarnya dilakukan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik merasa dirugikan. Sehingga, tujuan dari komunikasi efektif ini adalah untuk menemukan keputusan penyelesaian konflik yang sesuai, dimana mungkin atau tidak mungkin menguntungkan kedua belah pihak. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak ketiga dalam upaya penyelesaian permasalahan Pancursari ada 2 kegiatan yang dilakukan. Mediasi dan *hearing* adalah tindakan yang diambil untuk penyelesaian permasalahan.

Salah satu tindakan yang sering digunakan dalam berkomunikasi efektif adalah mediasi. Kegiatan ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam penyelesaian permasalahan KSU kebun Pancursari. Dengan dilakukannya mediasi tersebut diharapkan adanya solusi terbaik untuk jalan keluar permasalahan tersebut. Sementara itu *hearing* yang dilakukan demi tercapainya penyelesaian permasalahan konflik Perkebunan yaitu melalui *hearing* kepada Pihak DPRD Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Sumbermanjing hingga Polres Malang. *Hearing* sendiri merupakan suatu konsep pemecahan suatu masalah melalui pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. *Hearing* sendiri di dalamnya memiliki batas tugas dan kewenangannya yang berisikan (anggota masyarakat, lembaga atau badan pemerintah, dan sebagainya).

Keenam, banyak kesepakatan yang terjadi pada berbagai pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan. Kesepakatan-kesepakatan itu diambil dan disetujui oleh kedua belah pihak yang salaing berkonflik. Kesepakatan tersebut antara lain

1. Kesepakatan untuk tidak mendekatai maupun menggarap lahan untuk sementara pada lahan sengketa antara masyarakat Desa Tegalrejo dengan Perkebunan Pancursari
2. Pembayaran kekurangan KSU dengan sistem sewa lahan oleh masyarakat penyewa lahan kepada pemilik lahan yaitu PTPN XII Kebun Pancursari

3. Pengembalian lahan setelah masa akhir KSU karena lahan tersebut merupakan lahan tunggu yang akan digunakan untuk penanaman tanaman kebun

Namun dari kesepakatan diatas yang tertuang dalam akta notaris belum bisa dilaksanakan sampai sekarang. Dan pada akhirnya pihak perkebunan menempuh jalur hukum.

6.2 Rekomendasi

Bahwasanya berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan serta analisis peneliti, terdapat pemahaman bahwa melihat peran pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan kebun Pancursari terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan perbaikan tentang manajemen konflik PTPN XII Kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo. Dengan ini diharapkan akan terjadi perubahan untuk menciptakan model pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, yaitu:

1. Penataan kembali peraturan yang ada tentang pemberian Hak guna Usaha agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan satu dengan lainnya. Disini antar sektor pemerintah baik pusat maupun daerah saling berkoordinasi sebelum membuat peraturan. Sehingga dilain waktu, masyarakat tidak dibuat bingung mengenai peraturan yang ada.
2. Pengukuran kembali tanah tanah pekebunan yang sudah ada, agar masyarakat, pemerintah, pihak perkebunan mengerti batas-batas wilayah mereka. Sehingga dilain hari tidak ada lagi aksi saling mengakui wilayahnya. Dengan batas yang jelas serta pemberian sertipikat maka

mempunyai kekuatan hukum bila mana suatu hari ada yang mempersoalkan status wilayah tersebut sehingga dengan mudah dapat diselesaikannya.

3. Pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan untuk bekerja di wilayah perkebunan tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, maka masyarakat mempunyai andil untuk menjaga dan merawat perkebunan tersebut. Sehingga keharmonisan hubungan antara Perkebunan dengan masyarakat dapat terjaga dengan baik.
4. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih mendalam tentang pemberian kewenangan ataupun penguasaan atas lahan perkebunan sejak awal pemberian Hak Guna Usaha sampai sekaarang, karena disana banyaknya tumpang tindih peraturan yang perlu dikaji lebih mendalam sehingga dikemudian hari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak saling berbenturan antara peraturan satu dengan lainnnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- _____. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dean, Pruitt G. dan Rubin Z. Jeffrey. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harrison, Lisa. 2009. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.A. Rusdiana. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia,
- Lawing, Robert. 1994. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Limbong, Bernhard. 2013. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Restu Kartiko Widi. 2010. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryanto. 2010. *Manajemen Konflik sebagai Salah Satu Solusi dalam Pemecahan Masalah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- S.N. Kartikasari. 2011. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Sutedi, Andrian. 2012. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI/ TUGAS AHIR

- Prasetyo, Deni. 2017, *Konflik Pemanfaatan Mata Air Sumber Pitu Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Ari, Setiarsih Kardina. 2012. *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fuat, Hasan. 2016. *Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan Di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sahlan. 2015. *Konflik antara masyarakat dengan pemerintah (studi kasus pada eksplorasi tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hasanudin.

JURNAL

Karnaji. "Konflik tanah perkebunan di Malang selatan". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Th. XVI, No 4, Oktober 2003. Hlm 36

WAWANCARA

Wawancara dengan Ari Ismanto selaku Kepala Desa Tegalrejo dan Koordinator penyewa lahan PTPN XII Kebun Pancursari pada tanggal 28 Februari 2018, Pukul 08.20 WIB.

Wawancara dengan Anam selaku Kepala urusan pemerintah di Desa Tehalrejo Pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 13.15 WIB

Wawancara dengan Drs. Didik Gatot Subroto selaku ketua komisi satu DPRD kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2018, Pukul 14.15 WIB.

Wawancara dengan Hendrianto selaku manajer Kebun Pancursari pada tanggal 3 Juli 2018, Pukul 09.45 WIB.

Wawancara dengan Agus Harianto, S.Sos., M.AP. selaku Camat Sumbermanjingwetan pada tanggal 4 Juli 2018, Pukul 08.30 WIB.

Wawancara dengan Wiji selaku sekretaris Desa Tegalrejo pada tanggal 4 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Hendro selaku Kepala Bidang Hukum Pertanahan Kabupaten Malang pada tanggal 18 Juli 2018, Pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Sunardi Riyono, S.H. selaku Kepala Bagian Ops Polres Malang pada tanggal 27 Juli 2018, Pukul 08.50 WIB.

Wawancara dengan Heny Sulstyowati selaku Kepala Bidang Permasalahan, Konflik dan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juli 2018, Pukul 10.25 WIB

Wawancara dengan Sahura selaku Kepala Bidang Penanganan kasus seksi Pertanahan dan ekosistem YLBHI-LBH Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018, Pukul 10.45 WIB.

WEBSITE

Berita Jatim. *“Ini Daftar Konflik dan Sengketa Tanah di Kabupaten Malang”*. Diakses dari [http://beritajatim.com/hukum_kriminal/273995/ini_daftar_konflik_dan_sengketa_tanah_di_kabupaten_malang_\(ii\).html](http://beritajatim.com/hukum_kriminal/273995/ini_daftar_konflik_dan_sengketa_tanah_di_kabupaten_malang_(ii).html) Pada hari jum'at, 1 Desember 2017. Pukul 08.14.

Buletin PTPN XII. *“Kebun Pancursari, Raksasa yang Sedang Tertidur”*. Diakses pada <https://www.ptpn12.com/file/buletin/edisi9/hal%207.pdf>. Pada hari Selasa, 5 Desember 2017. Pukul 10.47 WIB.

Harian Birawa. *“Laporan Penyerobotan tanah PTPN”*. Diakses pada <http://harianbhirawa.com/2017/06/laporan-penyerobotan-lahan-ptpn-xii-di-polres-malang-suram/>. Pada hari Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 22.43 WIB.

Kumparan. Diakses pada <https://kumparan.com/beritajatim/ribuan-pohon-karet-kebun-pancursari-ptpn-xii-dibakar-orang-tak-dikenal>, Pada hari jum'at, 1 Desember 2017. Pukul 08.21

PTPN. Diakses pada <http://www.ptpn12.com/index.php/tentang-kami/profil>. Pada hari Selasa, 5 Desember 2015, Pukul 22.02 WIB.

